

TESIS

**PENGARUH UANG TERHADAP PROBABILITAS PILIHAN PEMILIH
DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2008**

KKB
KK-2
TS 08/09
Aff
P



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**Mochamad Arif Affandi
090610054**

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
**PENGARUH UANG TERHADAP
PROBABILITAS PILIHAN PEMILIH
DALAM PILKADA JAWA TIMUR 2008**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga**

Oleh:

Mochamad Arif Affandi

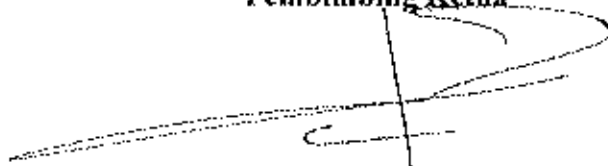
090610054

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Tanggal 28 Agustus 2008

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 AGUSTUS 2008**

Oleh:
Pembimbing Ketua



**Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D
NIP: 131 835 623**

Pembimbing



**Drs. Muhammad Asfar, M.Si
NIP: 131 918 695**

**Mengetahui
KPS**



**Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D
NIP: 131 835 623**

Telah diuji pada
Tanggal 28 Agustus 2008
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Budi Prasetyo, Drs., M.Si
Anggota : 1. Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D
2. Drs. Muhammad Asfar, M.Si
3. Dra. Dwi Windyastuti, M.Si
4. Drs. Gitadi Tegases, MA

Kata Pengantar

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Cinta kasih yang tak terhingga selalu tertuju kepada Istriku tercinta, Fairus Faqih, dan ananda Fildzah C. Affandi, yang telah dengan sabar mendampingi dan memberikan semangat untuk terus maju menuntut ilmu.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Drs. Muhammad Asfar M.Si dan Prof. Kacung Marijan yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh teman dan kolega di Universitas Airlangga dan Unesa yang telah membantu penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulisan tesis ini tentu masih jauh dari sempurna, baik substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saya senantiasa mengharapkan saran dan masukan demi kesempurnaan tulisan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 6 Oktober 2008

Mochamad Arif Affandi

RINGKASAN

Salah satu permasalahan utama sejak dilaksanakan pemilihan langsung adalah praktik politik uang. Politik uang seakan menjadi momok yang membayang-bayangi hampir semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Krisis ekonomi yang sudah mendera selama hampir satu dekade membuat masyarakat menjadi ladang empuk bagi sasaran politik suap, guna mempengaruhi pilihan politik mereka.

Dalam konteks pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008, sebagai pilkada terbesar yang pernah dilaksanakan, dugaan terjadinya politik uang juga disampaikan oleh banyak pihak. Sehingga diyakini, bahwa elit-elit politik tersebut akan menggunakan cara apapun untuk dapat memenangkan kompetisi pilkada, termasuk dengan membeli suara pemilih.

Penelitian dengan judul *Pengaruh Uang Terhadap Probabilitas Pilihan Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008* bertujuan untuk memprediksi dan mengetahui hubungan antara karakteristik sosial, ekonomi dan politik masyarakat terhadap kecenderungannya untuk memilih kandidat yang memberikan uang.

Dengan menggunakan metode tabulasi silang dan analisis regresi logistik, penelitian yang dilakukan menemukan data bahwa ada hubungan antara jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, dan pilihan partai politik terhadap kecenderungan untuk memilih calon pemberi uang. Parameter estimasi menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 4,878 kali lebih besar daripada responden laki-laki. Responden dengan umur antara 40-49 tahun kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 2,680 kali lebih besar daripada responden berumur di atas 50 tahun. Responden yang tidak bersekolah kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 58,823 kali lebih besar daripada responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Responden dengan pekerjaan petani kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 6,802 kali lebih besar daripada responden dengan pekerjaan pedagang. Responden tidak berpenghasilan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 9,259 kali lebih besar daripada responden dengan penghasilan di atas 2 juta. Responden berpenghasilan di bawah 500 ribu perbulan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 7,812 kali lebih besar daripada responden dengan penghasilan di atas 2 juta. Responden pemilih PKB kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 3,215 kali lebih besar daripada responden pemilih Golkar. Responden pemilih Demokrat kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 0,107 lebih besar daripada responden dengan pemilih Golkar.

Sedangkan variabel lokasi tempat tinggal, agama, dan aktifitas organisasi keagamaan tidak memiliki hubungan dengan kecenderungan pemilih untuk memilih calon pemberi uang.

Key Word : Uang, Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Abstract

One of the most problems during democratization process in Indonesia was money politics on elections. The illegal practices of money always haunted the political contestation in every level of government; especially during the local election we called *PILKADA*. This study was trying to predict the influence of money on governor election on East Java Province 2008. Also explaining how could money interfere the political preference of voters during the elections.

In order to predict and analyzing data, this study used cross tabulation and logistic regression with computer software SPSS 15. The statistical test shows that several independent variable of social, economic and political characteristic such as: sexes, age degree, school degree, income per month, occupation and political party, have strong correlation with the political preferences of money.

First, the probability female voters to choose the candidates with money are 4,878 times higher than male voters. Second, the probability voters in range 40-49 years old to choose the candidates with money are 2,680 times higher than voters up to 50 years old. Third, uneducated voters are 58,823 higher than post graduated voters to choose the candidates with money. Forth, farmer voters are 6,802 higher than merchant voters to choose the candidates with money. Fifth, a voter that doesn't have income is 9,259 higher than voters with income per month up to 2 million and voters with income per month less than 500 thousand rupiah are 7,812 higher than voters with income per month up to 2 million to choose the candidates with money. Seventh, PKB's voters are 3,215 higher than Golkar's voters and Demokrat's voters are 0,107 higher than Golkar's voters to choose the candidates with money.

Keywords: money, money politics, election

DAFTAR ISI

Sampul depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Prasyarat Gelar.....	iii
Persetujuan.....	iv
Penetapan panitia.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Ringkasan.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	ix
Daftar tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xi
Bab I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
Bab II. Kerangka Teori.....	6
II.1. Perdebatan Teori Pilihan Rasional Dalam Ranah Sosiologi.....	7
II.2. Pendekatan Pilihan Rasional Dalam Ranah Ilmu Politik.....	9
Bab III. Kerangka Konseptual.....	18
III.1. Konseptualisasi.....	18
III.2 Definisi Operasional.....	27
III.3 Hipotesis.....	28
Bab IV. Metodologi.....	30
IV.1 Tipe Penelitian.....	30
IV.2 Waktu Penelitian.....	30
IV.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulannya.....	31
IV.4 Populasi dan Sampel.....	31
IV.5 Teknik Analisis Data.....	32
IV.6. Variabel Penelitian.....	33
Bab V. Deskripsi Obyek Penelitian.....	37
V.1 Gambaran Umum Jawa Timur.....	37
V.2 Pilkada Langsung Jawa Timur 2008.....	44
Bab VI. Temuan dan Analisis Data.....	53
VI.1. Karakteristik Responden.....	53
VI.2. Hubungan Antar Variabel dan Pilihan.....	60

VI.3. Variabel-variabel yang berpengaruh Terhadap	
Pilihan.....	76
VI.4. Analisis Teoritik.....	85
Bab VII. Penutup.....	91
Daftar Pustaka.....	95
Lampiran.....	96

Daftar Tabel

Tabel 5.1. Topografi Luas Kemiringan Lahan.....	39
Tabel 5.2. Topografi Ketinggian Di Atas Permukaan Laut.....	40
Tabel 5.3. Pembagian Wilayah Administrasi.....	41
Tabel 5.4. Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....	41
Tabel 5.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 6.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel 6.2. Karakteristik Keluarga Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 6.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel 6.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	56
Tabel 6.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama.....	56
Tabel 6.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilannya.....	57
Tabel 6.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal.....	58
Tabel 6.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Kemasyarakatan..	58
Tabel 6.9. Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Kemasyarakatan..	59
Tabel 6.10. Sikap Ketika Diberi Uang Oleh Kandidat/Tim Sukses Tinggal....	60
Tabel 6.11. Pilihan Gubernur.....	61
Tabel 6.12. Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Pilihan Pemilih.....	62
Tabel 6.13. Tabulasi Silang Usia dengan Pilihan Pemilih.....	63
Tabel 6.14. Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Pilihan Pemilih.....	65
Tabel 6.15. Tabulasi Silang Pekerjaan dengan Pilihan Pemilih.....	67
Tabel 6.16. Tabulasi Silang Tingkat Penghasilan dengan Pilihan Pemilih....	69
Tabel 6.17. Tabulasi Silang Agama dan Pilihan Pemilih.....	70

Tabel 6.18. Tabulasi Silang Organisasi keagamaan dan Pilihan Pemilih.....	72
Tabel 6.19. Tabulasi Silang Pilihan partai pada pemilu 2004 dengan Pilihan Pemilih.....	73
Tabel 6.20. Tabulasi Silang Lokasi tempat tinggal dengan Pilihan Pemilih....	75
Tabel 6.21. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Jenis Kelamin dengan Pilihan Pemilih.....	77
Tabel 6.22. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Umur dengan Pilihan Pemilih.....	79
Tabel 6.23. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Tingkat Pendidikan dengan Pilihan Pemilih.....	80
Tabel 6.24. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Pekerjaan dengan Pilihan Pemilih.....	81
Tabel 6.25. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Penghasilan dengan Pilihan Pemilih.....	82
Tabel 6.26. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Agama dengan Pilihan Pemilih.....	82
Tabel 6.27. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Ormas dengan Pilihan Pemilih.....	83
Tabel 6.28. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Parpol dengan Pilihan Pemilih.....	83
Tabel 6.29. Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Lokasi Tempat Tinggal dengan Pilihan Pemilih.....	85

Daftar Gambar

Gambar 5.1. Peta Jawa Timur	38
-----------------------------------	----

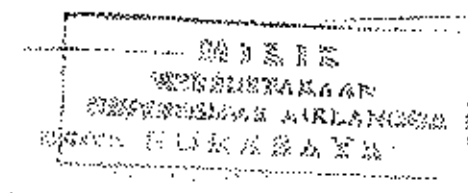
BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilaksanakannya pemilihan langsung untuk memilih Presiden dan kepala daerah, kedudukan dan peran rakyat menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Di satu sisi, masyarakat tidak lagi dapat dikatakan sebagai obyek politik semata. Seluruh lapisan masyarakat, tanpa melihat status sosial, ekonomi dan politik memiliki hak untuk ikut menentukan pimpinan negara dan daerahnya masing-masing selama lima tahun ke depan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah misalnya, aktor kunci tidak lagi ditangan pemerintah daerah dan DPRD saja, melainkan ratusan ribu dan bahkan hingga jutaan rakyat/pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki posisi yang sama pentingnya dalam menentukan kepala daerah.

Namun, di sisi lain pergeseran peran rakyat terhadap proses politik di Indonesia tersebut kurang diimbangi dengan pemahaman yang mendalam masing-masing aktor terhadap permasalahan politik. Perubahan radikal yang terjadi tersebut, menjelma menjadi *euforia* yang menjangkiti semua lapisan masyarakat mulai dari elit politik hingga masyarakat akar rumput. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya kelemahan yang muncul sejak dilaksanakannya pemilihan langsung di Indonesia. Semangat yang tinggi untuk melakukan perubahan wajah politik dengan cara menerapkan demokrasi secara konsekuen, tidak diimbangi dengan kesiapan SDM,



infrastruktur hukum, pers yang netral dan sebagainya. Akibatnya banyak pelaksanaan pilkada yang justru masih menyisakan persoalan di tingkat lokal.

Salah satu permasalahan yang semakin menguat sejak dilaksanakan pemilihan langsung adalah praktik politik uang dalam pemilu. Politik uang seakan menjadi momok yang membayang-bayangi hampir semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung. Krisis ekonomi yang sudah mendera selama hampir satu dekade membuat masyarakat menjadi ladang empuk bagi sasaran politik suap, guna mempengaruhi pilihan politik mereka. Dibandingkan dengan sumber daya lain sebagai pengendali, uang mempunyai kelebihan, yaitu likuid/cair, mudah dipindahkan dan tidak beridentitas, sehingga sulit dilacak. Disamping itu, dekatnya jarak antara pemilih dengan calon akan memudahkan melakukan *money politics*. Apalagi suasana dan sistem Pilkada langsung tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Dcsa (pilkades), dimana praktik politik uang sangat kental terjadi di dalamnya. Ada banyak cara untuk menerapkan *money politics* dalam pemilihan umum, misalnya saja yang terkenal dengan istilah *Operasi fajar*, yakni dengan menyebar uang kepada pemilih pada saat menjelang subuh pada hari pelaksanaan pemungutan suara. Modus yang lain misalnya dengan *Bujukan politik (political seduction)*, pemberian uang atau kupon yang nanti ditukar dengan uang jauh sebelum pelaksanaan pungutan suara. Modus serupa, namun dengan biaya yang lebih besar adalah pembelian suara tokoh yang memiliki massa. Menurut hasil riset ICW, politik uang dengan membagikan uang atau sumbangan secara langsung kepada pemilih tidak terlalu efektif kalau tidak bersamaan dengan membeli tokoh masyarakatnya.

Faktanya banyak partai-partai yang kuat dan solid yang melakukan politik uang tersebut ternyata perolehan suara mereka turun pada pemilu legislatif.¹

Dalam konteks pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008, banyak kalangan menilai bahwa dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan juga dari praktik politik uang (*money politics*). Pilkada Jatim yang dilaksanakan serentak pada tanggal 23 Juli 2008, dengan melibatkan lebih dari 29 juta pemilih yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dinilai sangat strategis bagi elit politik, baik lokal maupun nasional. Sehingga diyakini, bahwa elit-elit politik tersebut akan menggunakan cara apapun untuk dapat memenangkan kompetisi pilkada, termasuk dengan membeli suara pemilih.

Dengan latar belakang tersebut, tesis bertema "Pengaruh Uang Terhadap Probabilitas Pilihan Politik Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008" mencoba mengkaji pelaksanaan Pilkada Jatim yang difokuskan pada fenomena praktik politik uang terhadap pemilih. Apakah benar bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Jawa Timur sangat tinggi dan efektif dalam menggerakkan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang? Bagaimana karakteristik masyarakat yang cenderung setuju terhadap praktik politik uang dan sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Tentu saja untuk memperoleh jawaban obyektif atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan kajian langsung terhadap masyarakat pemilih di Jawa Timur. Dengan mengetahui kecenderungan pilihan masyarakat yang dipengaruhi oleh politik uang, maka akan dapat dirumuskan formula praktik politik uang yang terjadi

¹ Tempo Interaktif, 1 Juli 2004

dalam Pilkada Jawa Timur. Hal ini akan dapat menjadi masukan positif dalam upaya pendidikan politik bagi rakyat di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pilihan partai politik, pekerjaan, tingkat penghasilan dan lokasi tempat tinggal mempengaruhi pemilih untuk memilih calon Kepala Daerah yang memberi uang dalam Pilkada Jatim 2008?
2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pilihan pemilih untuk memilih calon Kepala Daerah yang memberi uang dalam Pilkada Jatim 2008?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya penulisan tesis ini antara lain adalah :

- a. Untuk memprediksi preferensi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Jatim
- b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, partai politik, pekerjaan, penghasilan, agama, aktifitas dalam organisasi kemasyarakatan dan lokasi tempat tinggal; mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung

- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian politik, khususnya pada area studi *votting behavior* di Indonesia.
- d. Untuk memenuhi tugas akhir (tesis) perkuliahan di Program Pasca Sarjana, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam mengkaji permasalahan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap calon yang memberi uang dalam Pilkada, penulisan tesis ini akan menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) sebagai pisau analisis. Teori ini secara umum berusaha untuk menjelaskan perilaku aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (nilai, keperluan). Teori ini tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.²

Meski teori pilihan rasional berawal dari tujuan dan maksud aktor, namun teori ini memperhatikan sekurang-kurangnya dua pemaksa utama tindakan. Pertama adalah keterbatasan sumber. Aktor mempunyai sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumber daya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumber daya besar, pencapaian tujuan menjadi relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumber daya sedikit, pencapaian tujuan mungkin sukar atau tidak mungkin sama sekali.

Berkaitan dengan keterbatasan sumber daya ini adalah munculnya pemikiran tentang biaya kesempatan. Dalam mengejar tujuan tertentu, aktor tentu

² George Ritzer dan Douglas J. Goodmann, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Utama, 2004, h 357

memperhatikan biaya tindakan selanjutnya yang tidak jadi dilakukan. Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang sangat tinggi bila sumber dayanya tidak memadai, bila peluang untuk mencapai tujuan itu mengancam peluangnya untuk mencapai tujuan berikutnya. Aktor dipandang berupaya untuk mencapai keuntungan yang maksimal.

II.1. Perdebatan Teori Pilihan Rasional Dalam Ranah Sosiologi

Teori pilihan rasional dalam ranah sosiologi berakar dari teori pertukaran sosial (*social exchange*), meski dalam perkembangannya terakhir kedua teori tersebut tidak saling bertemu. Perkembangan awal teori pilihan rasional banyak mengacu pada teori pertukaran George Caspar Homans. Inti teori Homans terletak pada sekumpulan proposisi fundamental. Pertama, *The Success Proposition*, bahwa untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khusus diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu. Kedua, *The Stimulus Proposition*, bahwa bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan seseorang memperoleh hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan masa lalu, maka makin besar orang melakukan tindakan serupa. Ketiga, *The Value Proposition*, bahwa makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Keempat, *The Deprivation-Stationation Proposition*, makin sering menerima hadiah khusus di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilai baginya setiap unit hadiah berikutnya. Kelima, *The Agression-Approval Proposition*, a) bila tindakan orang tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman

yang tidak ia harapkan, ia akan marah, besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian menjadi semakin bernilai baginya.

b) bila tindakan seseorang menerima hadiah yang ia harapkan terutama hadiah yang lebih besar dari yang ia harapkan, atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas, ia makin besar kemungkinannya melaksanakan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan itu akan semakin bernilai baginya. keenam, *The Rationality Proposition*, bahwa dalam memilih diantara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu diantaranya, yang dia anggap memiliki *value* (V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas (p), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Pada akhirnya, teori Homans dapat diringkas menjadi pandangan aktor sebagai pencari keuntungan yang rasional.

Berbeda dengan Homans yang bekerja di wilayah mikro, Peter Blau mengembangkan teori pertukaran ke tingkat makro terutama dengan memusatkan perhatian pada norma. Blau fokus pada proses pertukaran yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Menurutnya, seseorang tidak dapat menganalisis interaksi sosial terpisah dari struktur sosial yang melingkupinya. Struktur sosial muncul dari interaksi sosial tetapi segera setelah muncul, struktur sosial terpisah keberadaannya dan mempengaruhi proses interaksi.

Perkembangan teori pertukaran menuju teori pilihan rasional dalam sosiologi mencapai puncaknya dalam pemikiran seorang James S. Coleman. Menurutnya, sosiologi seharusnya memusatkan perhatian pada sistem sosial. Tetapi, fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, khususnya oleh faktor

individual. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada satu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau preferensi. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh sang aktor.

11.2 Pendekatan Pilihan Rasional Dalam Ranah Ilmu Politik

Dengan asumsi-asumsi yang hampir sama dengan teori pilihan rasional sosiologi, pilihan rasional dalam ilmu politik juga melihat pada kalkulasi untung-rugi pada setiap tindakan aktor politik. Misalnya saja pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Pendekatan ini meyakini bahwa pertimbangan utama pemilih dalam menentukan pilihannya adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian dari sikap politik yang diambilnya. Sejauhmana dampak positif pilihan politik tersebut terhadap kepentingan personal pemilih menjadi pertimbangan utama, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional yaitu memberikan suara kepada

calon kepala daerah yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekankan kerugian atau kemudlaratan yang sekecil-kecilnya.

Dengan demikian, perilaku memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (*maximum gained*) atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit. Tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil (*least risk*).³ Dengan demikian diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang ditawarkan oleh calon kepala daerah begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi di bidang masing-masing seperti seni, olah raga, film, organisasi, politik dan lain-lain.

Him Melweit dan koleganya menyebutkan sebagai "*Consumer Model*" of *party choice*, bahwa perilaku pemilih merupakan pengambilan keputusan yang bersifat instan, tergantung pada situasi politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan-pengambilan keputusan-keputusan lain. Mereka mencatat bahwa "*some express hope that voters, loosened from traditional partisan attachment, will be able to exercise more rational choice based on the thoughtful consideration of the issue*".

Hubungan isu-isu politik dan penilaian kandidat dengan perilaku memilih akan tampak lebih jelas dengan melihat hasil penelitian Pomper di Amerika Serikat. Dengan membandingkan tiga kali hasil penelitiannya pada Pemilu 1954, 1964, 1972 Pomper mengajukan tiga kesimpulan, *pertama*, hubungan antara variabel sosio-ekonomi dengan sikap memilih semakin melemah dari pemilu ke pemilu dan turun

³ Lihat tulisan Ramlan Surbakti, "Memilih Secara Rasional". Di Harian sore *Surabaya Post*, 1992.

sampai tingkat yang terendah pada 1972. Faktor-faktor demografis ketika dihubungkan dengan sikap pemilih juga mengalami hal yang sama. *Kedua*, posisi isu-isu politik dalam menentukan voting meningkat secara tajam, baik dampaknya secara langsung terhadap pilihan pemilih maupun secara tidak langsung melalui pemilihan calon kandidat. *Ketiga*, terjadi penurunan pengaruh identifikasi partai terhadap pilihan pemilih secara terus menerus mulai dari Pemilu 1956, 1964 sampai puncaknya pada Pemilu 1972.⁴

Sedangkan Richard R Lau dan David P Redlawsk⁵ menilai bahwa seseorang memutuskan untuk memilih salah satu pasangan calon dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Model 1: *Rational Choice*. Model 2: *Early Socialization and Cognitive Consistency*. Model 3: *Fast and Frugal Decision Making*. Model 4: *Bounded Rationality and Instuitive Decision Making*.

Rational Choice ini diadopsi dari ilmu teori ekonomi dimana masyarakat berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal dengan meminimalisir biaya sehingga dalam aplikasi politik masyarakat akan memilih kandidat yang akan memberikan keuntungan yang sebesar-sebesarnya dan tidak akan memilih kandidat yang dirasa tidak memberikan keuntungan. Pemilih rasional untuk memutuskan pilihannya kepada kandidat sebelumnya mencari informasi yang berkaitan dengan kandidat. Informasi tentang kandidat dalam hal ini seperti visi, misi dan program. Informasi tentang kandidat ini berkaitan juga dengan *track record* kandidat. Dengan mencari

⁴ Dalam menjelaskan perilaku memilih di Amerika Serikat, Pomper memakai enam variabel penjelas: Famili Socioeconomic Partisan Predisposition (FSPP), Family Party Identification (FPI), Responden's Socioeconomic Partisan Predisposition (RSPP), Responden's Party Identification (RPI), Partisan Issue Index (ISSI), Kandidat Evaluation (CE), dan Respondent's Vote (RV).

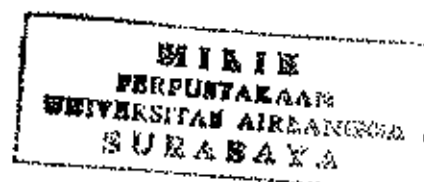
⁵ Richard R Lau dan David P Redlawsk, *How Voters Decide*, New York: Cambridge University Press, 2006. 14.3-20.

informasi yang sebanyak-banyaknya sehingga bisa memilih kandidat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Early Socialization and Cognitive Consistency ini pemilih mendasarkan pilihannya pada sosialisasi awal yang didapatnya. Sosialisasi awal ini bisa didapatkannya dari indentifikasi partai para pemilih. Dengan indentifikasi partai pemilih bisa memberikan pilihannya pada kandidat. Teori ini menganggap bahwa pemberitaan di media massa syarat dengan tujuan yaitu pencitraan dan pemberitaan media bisa membiaskan sosialisasi awal yang didapat pemilih dari indentifikasi partai. Setelah pemilih mendapatkan informasi awal dari indentifikasi partai selanjutnya pemilih melihat isu-isu yang ditawarkan kandidat, persepsi terhadap kandidat, ras, gender, evaluasi ekonomi dan evaluasi kepemimpinan *incumbent* dan ini semua tercekam dalam *cognitive consistency*.

Fast and Frugal Decision Making. Model ini menggambarkan bahwa seseorang dalam mengambil keputusan mencari secara aktif informasi tentang kandidat tapi hanya yang dianggap baik atau peduli dengan pemilih (individu) dan mengabaikan lainnya. Jadi pemilih hanya memilih kepada kandidat yang menawarkan isu yang berkaitan dengan pemilih seperti pendidikan gratis, kesehatan dan pemberian kesempatan kerja.

Bounded Rationality and Instuitive Decision Making. Model ini menjelaskan bahwa seseorang akan memilih kandidat yang partainya akan melindungi atau memberikan keuntungan pada pemilih. Seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilai oleh sebagian orang sebagai partai garis keras walaupun bersih dan mencoba untuk inklusif. Masyarakat Indonesia lebih suka memilih partai yang tidak terlalu



ketat dengan ideologi agama dan lebih senang memilih partai yang nasionalis seperti PDIP, P. Golkar. Jadi stereotip masyarakat terhadap suatu partai atau kandidat yang dijadikan pertimbangan memilih.

Dalam menjelaskan fenomena *money politics* pada Pilkada Jawa Timur, penulisan tesis ini akan menggunakan pendekatan pilihan rasional untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pilihan pemilih terhadap praktik pemberian uang. Dalam konteks ini uang dapat diartikan sebagai bagian dari isu-isu politik yang ditawarkan oleh kandidat kepada masyarakat pemilih. Sehingga, bagi mereka yang memilih dikarenakan adanya pemberian uang sesaat sebelum pemilihan dapat dikatakan telah mempertimbangkan betul aspek untung-rugi atas sikapnya tersebut. Termasuk ketika menolak untuk memilih kandidat yang memberikan uang, merupakan sikap rasional untuk menghindari kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang atau tidak memilih yang memberi uang dimaknai sebagai perilaku rasional pemilih untuk memaksimalkan keuntungan atas sikap politik yang diambilnya.

Oleh karena kajian tentang pengaruh pemberian uang terhadap pilihan politik pemilih belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi *votting behavior*,⁶ disertai dengan minimnya literatur penunjang, maka penulisan tesis ini akan mengasumsikan beberapa kecenderungan umum pilihan pemilih terhadap kandidat yang memberikan

⁶ Kajian *votting behavior* terkait pengaruh uang terhadap pilihan politik masih sangat sedikit. Kalaupun ada, kajian yang dilakukan membahas uang dari sudut pandang *political cost* atau pembiayaan politik, bukan dalam pengertian membeli suara pemilih sebagaimana yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

uang dalam pemilu/pilkada berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh Ismawan⁷.

Kajian yang dilakukan oleh Ismawan menjelaskan bahwa sesungguhnya praktik politik uang merupakan sesuatu yang lazim terjadi pada pemilu di Indonesia. Praktik politik uang dapat dilihat pada proses demokrasi di tingkat yang paling rendah, misalnya pemilihan kepala desa (pilkades). Para calon kepala desa acapkali mendadak menjadi "sinterklas" menjelang hari pemungutan suara. Mereka membagi uang atau barang agar pilihan rakyat akan jatuh kepadanya. Tidak jarang seorang calon kepala desa mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk meraih kemenangan dalam pilkades. Para *boroh* ikut meramaikan atau justru memperkeruh situasi dengan pertarungan yang berbau perjudian.

Pada level demokrasi *akar rumput* ini praktik politik uang dalam bentuk pembelian suara pemilih tumbuh subur. Karena dianggap sebagai kewajaran, masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa politik uang secara normatif harus dihindari. Menurut Ismawan, terdapat beberapa prakondisi yang memungkinkan terjadi praktik politik uang,

Pertama, politik massa mengambang (*floating mass*) yang mengeliminasi tumbuhnya loyalitas individual terhadap partai politik. Skeptisisme politik massa terhadap penguasa orba memunculkan aksi petualang politik untuk membeli suara mereka yang baru saja memahami permasalahan politik. Sedangkan di sisi lain, masyarakat (pemegang hak pilih) yang sudah siap dengan proses reformasi, akan dapat menyikapi kecenderungan politik uang secara lebih baik. mereka menyadari bahwa

⁷ Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999, h 19-20

bahwa reformasi adalah terbukanya koridor demokrasi menuju kedaulatan rakyat yang semakin hakiki. Dengan demikian tidak selayaknya apabila kedaulatan rakyat tersebut dijual kembali untuk memperoleh imbalan uang.

Kedua, struktur sosio-kultural yang terpelihara sejak era kolonial, yakni budaya korupsi. Kebiasaan birokrat untuk melakukan tindak korupsi, serta kecenderungan para pengusaha untuk melakukan penyuapan demi memperlancar usahanya, adalah lahan subur bagi tumbuhnya benih-benih politik uang.

Ketiga, angka kemiskinan absolut juga menjadi latar belakang penting. Meningkatnya harga kebutuhan pokok menyebabkan jutaan orang usli memnuhi kebutuhan hidup. Kalau ada partai/kandidat kaya mendekati mereka lalu memberikan uang dan sembako, tentu saja rakyat miskin tersebut akan merasa berhutang budi. Bila mereka diminta untuk menyalurkan aspirasinya politiknya kepada partai/kandidat yang memberikan uang, besar kemungkinannya akan melakukan dengan senang hati.

Dengan mendasarkan pada kajian tersebut, beberapa asumsi kecenderungan pemilih untuk memilih kandidat pemberi uang adalah sebagai berikut:

Pertama, pemilih perempuan cenderung memilih kandidat yang memberi uang daripada pemilih laki-laki. Hal ini didasarkan pada posisi perempuan dalam kultur masyarakat Indonesia yang berperan sebagai pengelola keuangan dalam keluarga, sehingga memandang bahwa pemberian uang merupakan keuntungan tersendiri untuk menambah keuangan keluarga. Disamping itu, sikap perempuan yang cenderung pasif terhadap permasalahan politik juga mendorong perempuan untuk pragmatis dengan tidak banyak mempertimbangkan alasan lain selain keuntungan ekonomis dari pemberian uang.

Kedua, pemilih dengan usia tua cenderung memilih kandidat yang memberi uang daripada pemilih dengan usia muda. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemilih tua semakin terbatas dalam aktifitas berpolitik, termasuk dalam mengakses perkembangan masalah politik disekitarnya. Sedangkan pada usia-usia muda/produktif kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses politik terbuka lebar. Hal ini semakin menambah pertimbangan pilihan pada mereka yang berusia tua. Sehingga pemberian uang dianggap tidak terlalu signifikan mempengaruhi sikap pemilih muda. Disamping itu, para pemilih tua memiliki pengalaman sejarah yang cukup panjang selama rezim orde baru. Sehingga cenderung memiliki penilaian yang menganggap politik uang adalah suatu yang wajar.

Ketiga, pemilih dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memilih kandidat yang memberi uang daripada pemilih dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan mampu membawa seseorang pada posisi status sosial yang tinggi dalam masyarakat, sehingga faktor uang/materi bisa jadi tidak terlalu mendasar bagi mereka. Disamping itu, dengan tingkat pendidikan yang memadai, pemilih cenderung akan lebih banyak mempertimbangkan aspek lainnya dalam memilih calon, misalnya kualitas calon, program kerja dan sebagainya.

Keempat, pemilih dengan tingkat penghasilan rendah cenderung memilih kandidat yang memberi uang daripada pemilih dengan penghasilan yang tinggi. Argumentasi sama dengan tingkat pendidikan, bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka faktor uang menjadi tidak terlalu penting dalam mempengaruhi pilihan politik.

Kelima, pemilih dengan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang terbatas cenderung memilih kandidat yang memberi uang daripada pemilih dengan pekerjaan yang berpenghasilan besar. Penghasilan besar yang diperoleh saat bekerja akan menunjang perbaikan ekonomi keluarga, sehingga dengan kondisi ekonomi yang mapan, maka faktor uang menjadi tidak terlalu penting dalam mempengaruhi pilihan politik.

Keenam, pemilih dengan lokasi tempat tinggal di desa cenderung memilih kandidat yang memberi uang daripada pemilih yang tinggal di kota. Kondisi perekonomian di kota biasanya jauh lebih baik daripada di desa, sehingga faktor pemberian uang dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap pemilih yang tinggal di kota.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

III.1 Konseptualisasi

Beberapa konseptualisasi yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam suatu sistem politik demokrasi, kehadiran pemilu yang bebas dan adil adalah suatu keniscayaan. Sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.

Pemilu telah menjadi bagian universal dari kehidupan politik masyarakat politik internasional. Oleh karena itu, bisa dipahami jika banyak ilmuwan politik yang menggunakan pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Hanya saja, di banyak negara dunia ketiga maupun negara-negara berkembang, pemilu seringkali bukan merupakan tolak ukur yang akurat untuk mengukur demokrasi atau tidaknya suatu sistem politik. Artinya, ada atau tidaknya pemilu di suatu negara, tidak secara otomatis menggambarkan adanya atau tidaknya kehidupan demokrasi politik di negara tersebut. Karena pelaksanaan pemilu di negara-negara tersebut seringkali tidak dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu hanyalah sekedar

untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa secara formal bahwa persyaratan minimal sebagai sebuah negara demokrasi telah dilakukan.

Oleh karena itu dapat dimengerti, semakin pelaksanaan sebuah pemilu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (seperti dijalankan dengan bebas dan adil), maka semakin demokratislah suatu negara.

Betapapun begitu, harus disadari bahwa pemilu bukanlah satu-satunya indikator tegaknya sistem politik demokrasi, sebab demokrasi juga membutuhkan persyaratan-persyaratan lain. Diantaranya adalah adanya kebebasan menyuarakan pendapat, berorganisasi dan lain sebagainya.

Beberapa alasan mengapa pemilu menjadi sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatu negara, khususnya di negara dunia ketiga/negara berkembang antarlain karena :

- a. Melalui pemilu memungkinkan suatu masyarakat/komunitas politik melakukan transfer/perpindahan kekuasaan secara damai, tanpa ada pertumpahan darah maupun menimbulkan kekacauan.
- b. Melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik, mengingat suatu sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan dalam menyuarakan pendapat, kepentingan dan konflik secara terbuka. Dalam suatu sistem demokrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyuaran pendapat dan kepentingan maupun konflik yang terkait dengan memperebutkan

ataupun mempertahankan kekuasaan kemudian diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Adanya pemilu yang bebas dan adil memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana untuk berkonflik sesuai dengan aturan yang telah disepakati tanpa harus menggunakan kekuatan fisik dan senjata.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana menciptakan suatu pemilu yang bebas dan adil agar pertumpahan darah maupun kekacauan dimasyarakat tidak terjadi?. Secara konseptual terdapat dua mekanisme untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil, yaitu :

- a. Menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer/memindahkan suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil. Biasa disebut sebagai menciptakan sistem pemilihan (*electoral system*).
- b. Menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, atau yang oleh banyak kalangan ilmuwan disebut sebagai proses pemilihan (*electoral process*).

Syarat minimal sebuah pemilu dijalankan secara demokratis adalah apabila pemilu tersebut dijalankan secara bebas dan adil (*free dan fair*), sehingga didalamnya tercipta kondisi persaingan yang sehat (pemilu yang kompetitif). Syarat-syarat tersebut yaitu :

- a. Adanya hak pilih yang universal bagi orang dewasa (*universal adult suffrage*). Artinya bahwa setiap warga

negara dewasa mempunyai hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, faham ideologi, dan lain sebagainya, kecuali mereka sedang dicabut haknya berdasarkan undang-undang.

- b. Adanya proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*). Dimana untuk mengukur apakah suatu pemilu tersebut dijalankan secara *fair* atau tidak dapat diamati melalui beberapa indikator/ instrumen/ hal sebagai berikut :
- c. Adanya jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan yang harus dijamin/termaktub/terdapat dalam undang-undang pemilu.
- d. Adanya jaminan bahwa prosedur/tata cara penghitungan suara dilakukan secara terbuka dimana setiap warga negara memiliki akses/jalan dan berhak untuk menyaksikan prosesnya.
- e. Tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan, baik ditingkat pendaftaran, kampanye, pencoblosan/pemungutan suara, sampai pada tingkat penghitungan suara.
- f. Tidak adanya kekerasan, baik kekerasan politik yang dilakukan oleh aparat keamanan/pemerintahan, partai politik peserta pemilu, maupun para pemilih.

- g. Tidak adanya intimidasi, khususnya dalam proses pemilihan suara atau proses pencoblosan.
- h. Adanya hak -- khususnya bagi partai politik -- untuk mengorganisasi dan mengajukan para kandidat atau calonnya, sehingga para pemilih mempunyai banyak pilihan untuk memilih diantara para calon yang berbeda, baik secara kelompok maupun program-programnya.

Hak ini menyiratkan adanya dua persyaratan sebagai berikut :

- i. Pemilu haruslah memberi keleluasaan partai politik untuk mengatur dan mencalonkan kandidatnya tanpa seleksi terlebih dahulu dari pihak pemerintah atau aparat keamanan.
- ii. Menghilangkan berbagai aturan yang bisa membatasi kelompok-kelompok tertentu -- baik karena faham maupun orientasi/ tujuannya -- untuk terlibat dalam proses pemilihan.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam sebuah pemilu meliputi tiga tahap, yaitu pencalonan, kampanye dan pemilihan itu sendiri.

2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pilkada Langsung adalah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih. Warga masyarakat secara langsung, tanpa diwakilkan, memilih calon kepala daerahnya dalam sebuah

mekanisme yang jujur adil dan transparan. Artinya sejak kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka secara konseptual telah terjadi pergeseran pelaksana kedaulatan, yang sebelumnya di tangan DPR/DPRD beralih ke tangan rakyat.

Penyelenggaraan pilkada langsung dilaksanakan oleh institusi KPUD. Semua program dan tahapan pelaksanaan pilkada memerlukan kerjasama dan koordinasi diantara unsur-unsur terkait dan penting disekelilingnya.

Di antara *stakeholders* yang ada, sekurang-kurangnya yang paling strategis adalah:

- a. Unsur penyelenggara/pelaksana, yaitu KPUD dan jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) beserta tim sekretariatnya, serta panwas pilkada dan jajarannya.
- b. Unsur fasilitasi, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Kepolisian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Unsur peserta pilkada, yaitu partai politik dan pasangan calon
- d. Unsur pemilih pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan institusi konstitutif sekaligus instrumental. Sebagai institusi konstitutif, pilkada secara langsung harus diselenggarakan semata-mata karena alasan nilai dan prinsip yang sudah seharusnya dilaksanakan, tanpa terlalu memikirkan dan mengkalkulasi keuntungannya secara

pragmatis. Pilkada secara langsung merupakan konsekuensi dari pilihan sikap politik yang tidak bisa ditawar-tawar dalam berdemokrasi, khususnya dalam demokrasi di tingkat lokal. Sedangkan pemahaman bahwa pilkada juga merupakan institusi instrumental, meletakkan pilkada sebagai sebuah instrumen yang keberadaannya sangat tergantung dengan seberapa besar kemanfaatannya secara pragmatis. Sehingga dalam pandangan ini, pilkada sangat terbuka kemungkinannya untuk ditinjau-ulang, dievaluasi dan dimodifikasi demi kemanfaatan pragmatis yang dianggap layak untuk diprioritaskan.

3. Uang

Uang merupakan aktiva tak bersyarat yang diterima oleh semua orang dalam seluruh transaksi. Di berbagai masa yang berbeda dalam sejarah, barang-barang yang berbeda sudah digunakan sebagai uang seperti batu, garam, ternak atau rumah. Logam, khususnya emas, telah digunakan secara luas. Bentuk kertas modern dari uang berlaku pada Masa Pertengahan ketika uang pertama kali digunakan oleh parapedagang Venesia. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu

yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

4. Politik Uang

Konsep politik uang atau *money politics* sampai dengan saat ini masih sangat cair pemaknaannya. Dalam konteks situasi yang terakhir, politik uang dimaknai secara luas sebagai transaksi dengan imbalan uang yang bermakna politis, baik disadari atau tidak disadari oleh pelaku tersebut. Politik uang bukan hanya fenomena jual beli suara atau pengaruh, tapi lebih merupakan upaya sistematis untuk mengarahkan perilaku individu atau kelompok demi keuntungan politik si pemberi uang.

Dalam pemaknaannya yang lebih sempit, politik uang bisa diartikan sebagai upaya untuk membeli suara *voters* dengan imbalan materi, atau juga upaya donatur untuk menentukan arah gerak *voters* berdasarkan keinginan sendiri. Dalam taraf yang paling kasar, politik uang dipraktikkan dengan tindakan intimidasi.⁸

⁸ *Ibid*, hal 4

5. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya⁹.

Ketika sebuah keputusan politik mempengaruhi dan menyangkut kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Kegiatan partisipasi warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yakni mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dengan kata lain bahwa partisipasi politik merupakan perilaku politik, tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah pertama, berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati. Bukan perilaku dalam yang berupa sikap atau orientasi.

⁹ Ramlan Surbakti, *Op Cit.* Hal 140.

Kedua, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah. Keempat, kegiatan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, kegiatan ini dilakukan dalam prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan. Dan yang keenam, kegiatan individu untuk mempengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri, dan adapula yang dilakukan atas desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak luar (mobilisasi).

III.2. Definisi Operasional

1. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam tesis ini adalah Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2008

2. Uang

Uang dalam penulisan tesis ini adalah alat tukar resmi atau transaksi dalam bentuk mata uang rupiah, mulai dari pecahan ribuan hingga ratusan ribu rupiah.

3. Politik Uang

Politik uang atau *money politics* dalam penulisan tesis ini adalah praktik membeli suara *voters* dengan imbalan uang, yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses kandidat. Pembelian suara ini mulai dari tahap sebelum pencalonan hingga pelaksanaan pemungutan suara.

4. Partisipasi Politik

Partisipasi politik dalam penulisan tesis ini adalah keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam memilih pasangan kandidat calon gubernur Jawa Timur 2008-2013.

III.3 Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Ada hubungan antara variabel jenis kelamin dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang
2. Ada hubungan antara variabel usia dengan dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang
3. Ada hubungan antara variabel tingkat pendidikan dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang
4. Ada hubungan antara variabel tingkat penghasilan dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang

5. Ada hubungan antara variabel pekerjaan dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang
6. Ada hubungan antara variabel lokasi tempat tinggal dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang
7. Ada hubungan antara variabel aktifitas dalam organisasi kemasyarakatan dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang
8. Ada hubungan antara variabel agama dengan pilihan pemilih untuk memilih kandidat yang memberi uang

BAB IV

METODOLOGI

IV.1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang “Pengaruh Uang Terhadap Probabilitaas Pilihan Politik Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008” ini bertujuan tidak hanya untuk mendeskripsikan preferensi masyarakat di Jawa Timur terhadap politik uang. Namun juga ingin mengetahui hubungan antara beberapa variabel yang diteliti.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan tesis ini dapat dikategorikan dalam tipe penelitian yang bersifat eksplanatif. Yaitu penelitian yang tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala sosial yang tampak, tetapi lebih jauh lagi, ingin melihat hubungan kausalitas diantara gejala-gejala tersebut¹⁰.

IV.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dan penulisan laporan dilakukan selama empat bulan. Dimulai pada minggu pertama bulan April 2008, dan berakhir pada minggu keempat bulan Juli 2008. Untuk pengumpulan data sekunder, dimulai pada minggu pertama bulan April 2008 hingga minggu pertama bulan Mei 2008.

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Airlangga University Press ; Surabaya, 2001). Hal. 187

IV.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulannya

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan, dimana sebuah data dihasilkan.¹¹ Pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner/angket dan wawancara/interview.

Untuk menguatkan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang didapat dari instansi-instansi terkait baik yang ada di Pemerintahan Provinsi Jatim, maupun di lembaga lain yang berkompeten.

IV.4. Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti adalah masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan kepala daerah langsung 2008. Teknik pengambilan sampel penelitian yaitu dengan teknik *proporsional random sampling*, dimana peneliti mengambil sampel penelitian kecamatan pada setiap kabupaten/kota, dimana jumlah sampel masing-masing kabupaten dibagi secara proporsional. Sedangkan ditingkat kelurahan dan desa akan dilakukan secara acak sederhana. Jumlah pemilih dalam pemilihan umum tahun 2004 di Provinsi Jatim berjumlah sekitar 26.218.062 jiwa.

Oleh karena itu, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah

¹¹ *ibid.* Hal. 128-129

$$n = \frac{N}{1 + N d^2}$$

Dimana:

n = Besar sampel

N = Jumlah populasi

d = derajat kecermatan 5% (0,05)

$$n = \frac{26.218.062}{1 + 26.218.062 \times (0,05)^2}$$

$$n = 399,99 = 400$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka sampel yang akan diambil sebanyak 400 orang.

IV.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dilakukan editing (penyuntingan), hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan. Setelah itu dilakukan koding (penandaan) serta entry data sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga mempermudah untuk analisis. Data dianalisis dengan bantuan perangkat

komputer program SPSS. Teknik analisis data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode *regresi logistic*, yang bertujuan untuk mengetahui model terbaik dari beberapa variabel yang diteliti.

IV.6. Variabel Penelitian

Variabel adalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen/variabel terikat. Jadi bisa dikatakan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi¹².

Dalam penelitian tentang “Pengaruh Uang Terhadap Probabilitas Pilihan Politik Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008” variabel independennya adalah

:

i. Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Politik Responden.

Variabel ini antara lain : *Tingkat Pendidikan*, terkait dengan pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden dengan pilihan tidak pernah sekolah, pernah atau selesai menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, dan Perguruan Tinggi atau sederajat. *Jenis Kelamin*, terkait dengan apakah yang

¹² *ibid.*

bersangkutan laki-laki atau perempuan. *Usia*, terkait dengan usia responden dengan pilihan antara lain usia dibawah 20 tahun, usia 20 tahun hingga 29 tahun, usia 30 tahun hingga 39 tahun, usia 40-49 tahun dan usia di atas 50 tahun. *Pekerjaan*, terkait dengan pekerjaan utama responden yaitu apakah responden bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI – POLRI, Pelajar/mahasiswa, Karyawan Swasta atau Buruh, Pedagang, Sektor Informal seperti usaha penjahit, tambal ban, dll, Tidak Bekerja, dan lain-lain (sebutkan).

Penghasilan, terkait dengan penghasilan responden setiap bulannya dengan pilihan tidak berpenghasilan, penghasilan dibawah 500 ribu, penghasilan antara 500 ribu hingga 1 juta, penghasilan antara 1 juta hingga 1,5 juta, penghasilan antara 1,5 juta hingga 2 juta dan penghasilan di atas 2 juta. Dan apakah responden menggunakan sarana-sarana di atas untuk mendengar dan/atau melihat berita-berita politik, ekonomi, kriminal, olah raga, hiburan, dan lain-lain (sebutkan).

Pilihan Partai Politik Pada Pemilu 2004, terkait dengan pilihan partai mereka pada saat Pemilu Legislatif 2004. apakah Partai Nasional Indonesia Marhaen; Partai Buruh Sosial Demokrat; Partai Bulan Bintang; Partai Merdeka; Partai Pesatuan Pembangunan; Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan; Partai Perhimpunan Indonesia Baru; Partai Nasional Banteng Kemerdekaan; Partai Demokrat; Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Partai Penegak Demokrasi Indonesia; Partai Persatuan Nahdlatul Ummah; Partai Amanat

Nasional; Partai Karya Peduli Bangsa; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Keadilan Sejahtera; Partai Bintang Reformasi; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Damai Sejahtera; Partai Golongan Karya; Partai Patriot Pancasila; Partai Sarikat Indonesia; Partai Persatuan Daerah dan Partai Pelopor. *Lokasi Tempat Tinggal*, terkait dengan apakah responden tinggal di wilayah perkotaan atautkah pedesaan. *Aktifitas sosial kemasyarakatan*, terkait dengan apakah responden aktif dalam organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Ormas Islam Lainnya, Organisasi Gereja, Organisasi Hindu, dan lain-lain.

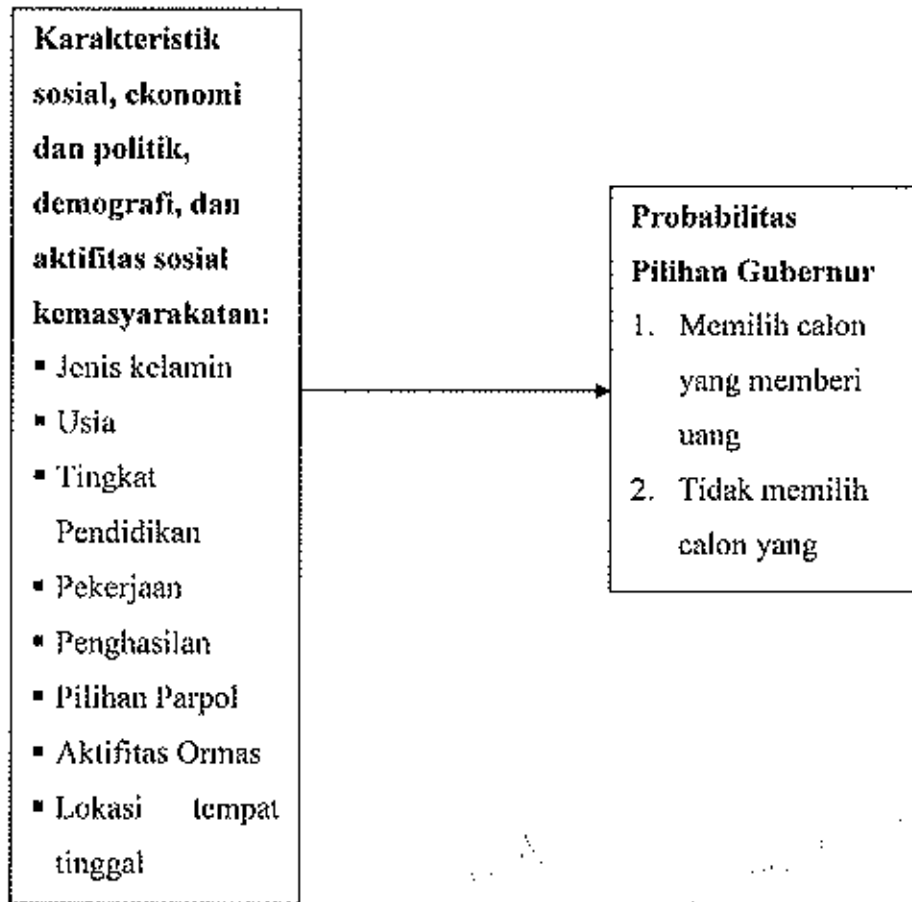
b. Variabel Dependen (Variabel Tergantung/Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dengan kata lain variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas¹³.

Dalam penelitian tentang “Pengaruh Uang Terhadap Probabilitas Pilihan Politik Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008”, variabel dependennya adalah pilihan Gubernur pada pemilihan Kepala Daerah Langsung di Jawa Timur pada tahun 2008. Indikatornya adalah apakah memilih kandidat yang memberikan uang atau tidak memilih kandidat yang memberikan uang.

¹³ *ibid.*

Bagan Variabel Penelitian



BAB V

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

V.1 Gambaran Umum Jawa Timur

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.478.737 jiwa. Jawa Timur merupakan provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia.

Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Jawa Timur terletak antara 110.57 BT dan Garis Lintang 5,37" LS dan 8,48 'LS dengan luas wilayah 47.157,72 Km². Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Batas-batas wilayah provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa

- Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Timur dengan Selat Bali / Provinsi Bali

Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Kepulauan Kangean dan yang paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil: Nusa Barung dan Pulau Sempu.

Gambar 5.1
Peta Jawa Timur



Dilihat dari segi Topografis, sebagian besar wilayah daratan di Jawa Timur (39,89 %) tergolong berpermukaan datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2 %. Sedangkan ketinggian tanah sebagian besar wilayah pada posisi 0 – 100 M diatas permukaan laut dengan jumlah mencapai 41,39 % dari total wilayah Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah berupa dataran rendah.

Tabel 5.1
Topografi Luas Kemiringan Lahan

Uraian	Luas kemiringan lahan (Ha)
Datar (0 – 2	1.797.789,19
Bergelombang (3 – 15 %)	1.292.207,05
Curam (16 – 40 %)	447.043,03
Sangat curam (> 40 %)	969.155,20

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat – zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Provinsi Jawa Timur mempunyai 48 gunung dan beberapa diantaranya yang masih aktif antara lain Gunung Kelud, Gunung Semeru yang mencapai ketinggian 3.676 meter, Gunung Lamongan yang merupakan gunung terendah dengan tinggi 1.668 meter dan gunung Bromo yang mulai kelihatan aktifitasnya. Sementara beberapa sungai besar yang aktif ikut mentransfer tanah yang subur diantaranya adalah sungai Brantas, sungai Bengawan Solo, Sungai Madiun, Sungai Konto dan lainnya.

Tabel 5.2
Topografi Ketinggian Di Atas Permukaan Laut

Uraian	Ketinggian di atas permukaan laut (Ha)
0 – 100 M	1.950.567,16
100 – 500 M	1.723.862,64
500 – 1.000 M	447.043,03
Lebih besar dari 1.000 M	591.541,84

Pembagian wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 s/d tahun 2007 terbagi dalam 4 (empat) *Badan* Koordinasi Wilayah / Pembantu Gubernur, 29 Kabupaten dan 9 Kota serta jumlah kecamatan berjumlah 642 kecamatan. Perwakilan kecamatan sejak tahun 2003 telah ditiadakan, sebelumnya berjumlah 114, dan Kota Administratif Batu sejak tahun 2003 telah menjadi Kota, sedang Kota Administratif Jember berdasarkan peraturan perundangan telah dicabut dengan demikian Jember hanya sebagai Kabupaten. Jumlah kelurahan sebanyak 785 Kelurahan dan Desa sebanyak 7.680 desa.

Tabel 5.3
Pembagian Wilayah Administrasi

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Badan Koordinasi Wilayah	4	4	4	4	4	4
Jumlah Kabupaten	29	29	29	29	29	29
Jumlah Kota	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecamatan	642	642	642	642	657	657
Jumlah Kelurahan	784	784	784	784	784	784
Jumlah Desa	7.715	7.715	7.715	7.715	8.484	8.484

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otoda Sekda Prop. Jatim & Jatim Dalam Angka 2006

Tabel 5.4
Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Penduduk	Kecamatan
1.	Kabupaten Pacitan	Pacitan	546.150	12
2.	Kabupaten Ponorogo	Ponorogo	880.701	21
3.	Kabupaten Trenggalek	Trenggalek	682.465	14
4.	Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	976.691	19
5.	Kabupaten Blitar	Blitar	1.131.222	22
6.	Kabupaten Kediri	Kediri	1.509.135	24
7.	Kabupaten Malang	Kepanjen	2.393.959	33
8.	Kabupaten Lumajang	Lumajang	1.017.839	21
9.	Kabupaten Jember	Jember	2.263.794	31
10.	Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi	1.564.026	24
11.	Kabupaten Bondowoso	Bondowoso	720.183	23

12.	Kabupaten Situbondo	Situbondo	631.382	17
13.	Kabupaten Probolinggo	Probolinggo	1.059.322	24
14.	Kabupaten Pasuruan	Pasuruan	1.464.297	24
15.	Kabupaten Sidoarjo	Sidoarjo	1.787.771	18
16.	Kabupaten Mojokerto	Mojokerto	1.008.740	18
17.	Kabupaten Jombang	Jombang	1.199.958	21
18.	Kabupaten Nganjuk	Nganjuk	1.053.569	20
19.	Kabupaten Madiun	Madiun	664.282	15
20.	Kabupaten Magetan	Magetan	621.511	17
21.	Kabupaten Ngawi	Ngawi	851.884	19
22.	Kabupaten Bojonegoro	Bojonegoro	1.238.811	27
23.	Kabupaten Tuban	Tuban	1.095.795	20
24.	Kabupaten Lamongan	Lamongan	1.261.972	27
25.	Kabupaten Gresik	Gresik	1.101.000	18
26.	Kabupaten Bangkalan	Bangkalan	926.560	18
27.	Kabupaten Sampang	Sampang	874.512	14
28.	Kabupaten Pamekasan	Pamekasan	768.587	13
29.	Kabupaten Sumenep	Sumenep	1.056.985	27
30.	Kota Kediri	-	254.367	3
31.	Kota Blitar	-	124.944	3
32.	Kota Malang	-	779.002	5
33.	Kota Probolinggo	-	205.490	3
34.	Kota Pasuruan	-	182.072	3

35.	Kota Mojokerto	-	116.383	2
36.	Kota Madiun	-	170.931	3
37.	Kota Surabaya	-	2.698.972	31
38.	Kota Batu	-	185.467	3
-	Jumlah		37.070.731	657

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terpadat penduduknya di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2006 penduduk Jawa Timur adalah 37.478.737 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya mencapai 2,39%. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur pada tahun 2004 sebesar 792 orang/km dan cenderung meningkat hingga sampai tahun 2005 mencapai 803 orang/km Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa Timur semakin padat penduduknya dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk yang terus menunjukkan kenaikan ini banyak ditentukan oleh faktor laju pertumbuhan penduduk, sementara luas wilayah Jawa Timur tidak berubah. Dari Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa pembangunan manusia mengalami perkembangan membaik. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya Angka Harapan Hidup dari 66,5 tahun pada 2002 menjadi 66,4 tahun. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pembangunan manusia pada aspek kesehatan semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, disamping factor ekonomi juga berperan terhadap peningkatan usia harapan hidup.

Tabel 5.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	TAHUN			
	2003	2004	2005	2006
Jumlah Penduduk (orang)	36.199.078	36.535.527	37.070.734	37.478.737
a. Laki-laki (orang)	17.930.967	18.052.364	18.285.468	
b. Perempuan (orang)	18.268.078	18.483.163	18.785.266	

V.2 Pilkada Langsung Jawa Timur 2008

Berdasarkan Keputusan KPUD Jawa Timur No 1 Tahun 2008, Kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Secara Langsung Tahun 2008 ke dalam 3 (tiga) Tahap kegiatan :

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Provinsi, meliputi :
 - a. Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;
 - b. Keputusan tentang Pedoman Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - d. Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - e. Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - f. Keputusan tentang Penetapan Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon ;
 - g. Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - h. Keputusan tentang Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye;
 - i. Keputusan tentang Tata Cara Audit Dana Kampanye;
 - j. Keputusan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Dana Kampanye;
 - k. Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - l. Keputusan tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

- m. Keputusan tentang Penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - n. Penetapan Format Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - o. Penetapan Format Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - p. Penetapan Format Kartu Pemilih, Jenis Formulir untuk Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
 - q. Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara;
 - r. Penetapan Format Bahan, Bentuk, Format, dan Ukuran Surat Suara Serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - s. Penetapan Format Pengumuman Pasangan Calon Terpilih.
3. Pembentukan Panitia Pengawas;
 4. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
 6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat PPK, PPS, dan KPPS.

Sedangkan kegiatan Tahap Pelaksanaan meliputi:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - a. Penerimaan daftar potensi pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dari pemerintah daerah;
 - b. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK;
 - c. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - d. Perbaikan daftar pemilih sementara ;
 - e. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap ;
 - f. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK ;
 - g. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan Saksi pasangan calon ;
 - h. Penyampaian Kartu Pemilih;
2. Pencalonan
 - a. Pengumuman Pendaftaran dan Pengambilan Formulir Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Parpol/Gabungan Parpol.
- b. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Parpol/Gabungan Parpol
 - c. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi I kepada KPU Provinsi.
 - d. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon.
 - e. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian.
 - f. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon.
 - g. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon .
 - h. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.
 - i. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pencetakan dan Pendistribusian
- a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara.
 - b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
 - c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan

dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Surat Suara.

4. Kampanye

- a. Pertemuan antar peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tentang pelaksanaan kampanye ;
- b. Pemberitahuan Tim Kampanye;
- c. Kampanye;
- d. Masa Tenang;

5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a. Persiapan.

1. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah
2. Pembentukan KPPS dan sosialisasi
3. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS
4. Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS
5. Penyiapan TPS

b. Pelaksanaan

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi :

1. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.
2. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.
3. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.
4. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.
5. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi.
6. Penetapan pasangan calon terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh KPU Provinsi.
7. Penyampaian Keberatan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung.
8. Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan.
9. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur terpilih.

Dan pada tahap akhir, Kegiatan meliputi:

1. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi;
2. Laporan KPU Provinsi, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur;
4. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
5. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
6. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta mengelola barang inventaris.

Pelaksanaan Pilkada Jatim dalam sejarah pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan yang terbesar di seluruh Indonesia. Pilkada Jatim melibatkan lebih dari 29 juta pemilih dan terdapat lima kandidat yang diusung oleh beberapa parpol di Jawa Timur. Nama-nama kandidat berdasarkan nomor urutnya adalah sebagai berikut:

1. **Hj. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA-MUDJIONO (Ka-Ji)**
2. **Ir. SUTJIPTO-IR. H. M. RIDWAN HISJAM (SR)**
3. **DR. H. SOENARJO, M. Si-DR. KH. ALI MASCHAN MOESA, M. Si (Salam)**
4. **Dr. H. ACHMADY, MSi, MM-H. SOEHARTONO, SH (Achsani)**
5. **DR. H. SOEKARWO, SH, M.Hum-Drs. H. SYAIFULLAH YUSUF (KarSa)**

Nama-nama kandidat tersebut diusung oleh beberapa partai politik. Pasangan Ka-Ji diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan koalisi beberapa partai non-parlemen. Pasangan SR diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Pasangan Salam diusung oleh Partai Golkar. Pasangan Achsan didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan KarSa diusung oleh koalisi PAN, PKS dan Demokrat.

BAB VI

TEMUAN DAN INTERPRETASI DATA

VI.1 Karakteristik Responden

Sebagaimana yang digambarkan pada bab sebelumnya, penulisan tesis ini dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa responden yang terjaring sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Responden berjenis kelamin laki-laki, dalam penelitian ini hanya sebesar 37 persen dari 400 responden. Sementara itu, sebanyak 63 persen berjenis kelamin perempuan. Jumlah yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan ini dikarenakan perempuan lebih mudah dijumpai di rumah pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan responden laki-laki kebanyakan tidak berada di rumah pada siang hari dikarenakan kesibukannya bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga. Lihat table 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Persentase
1.	Perempuan	63.0
2.	Laki-laki	37.0
		100

Dari sisi umur, kebanyakan responden yang terjaring berumur antara 40-49 tahun, yaitu sebanyak 30,5 persen. Sedangkan yang berusia di atas 50 tahun dan antara 30-39 tahun hampir berimbang, yakni masing-masing sebanyak 23,8 persen

dan 25,5 persen. Sisanya, berumur 20-29 tahun sebanyak 17,3 persen, kurang dari 20 tahun sekitar 3 persen.

Data tersebut menunjukkan komposisi yang hampir merata pada setiap jenjang usia, kecuali pada pemilih usia muda/pemula. Lihat table 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Karakteristik Keluarga Berdasarkan Umur

No.	Umur (tahun)	Persentase
1.	< 20	3.0
2.	20-29	17.3
3.	30-39	25.5
4.	40-49	30.5
5.	> 50	23.8
		100

Dari sisi pendidikan, umumnya responden yang diteliti berpendidikan SD, yaitu sekitar 34,8 persen. Jumlah ini disusul responden yang berpendidikan SLTP sebesar 22,5 persen, SLTA 21,3 persen, dan Perguruan Tinggi sebanyak 12,5 persen. Sisanya, sekitar 9 persen mengaku tidak sekolah. Data tersebut menunjukkan proporsi yang hampir berimbang antara semua jenjang pendidikan. Akan tetapi dari data tersebut terlihat bahwa pemilih yang terjaring dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan relatif rendah, yakni di bawah jenjang SD dan bahkan tidak bersekolah. Lihat table 6.3 berikut:

Tabel 6.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Persentase
1.	Tidak sekolah	9.0
2.	SD	34.8
3.	SLTP	22.5
4.	SLTA	21.3
5.	Perguruan Tinggi	12.5
		100

Dari sisi pekerjaan, sebagian besar responden yang diteliti mengaku bekerja sebagai petani. Terdapat sekitar 30,5 persen responden yang mengaku sebagai petani. Jumlah ini diikuti oleh warga yang mengaku bekerja di sektor informal seperti PKL, pekerja bangunan, sekitar 23,8 persen. Kemudian yang mengaku bekerja sebagai karyawan, jumlahnya mencapai 12,8 persen. Sekitar 7,5 persen yang mengaku sebagai PNS. Sekitar 6,5 persen responden mengaku bekerja sebagai pengusaha,. Sisanya, mengaku belum bekerja sebesar 3,3 persen.

Tabel 6.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Persentase
1.	Tidak bekerja	3.3
2.	PNS	7.5
4.	Pengusaha	6.5
5.	sektor informal	23.8
6	karyawan	12.8
8.	Petani	30.5
9.	pedagang	15.8
		100.0

Latarbelakang keagamaan responden umumnya relative homogen. Sekitar 97 persen responden mengaku beragama Islam. Sementara itu, yang mengaku beragama Kristen sebanyak 2,4 persen dan Katolik sebesar 0,3 persen. Ini berarti, jika dijumlah, ada sekitar 2,84 persen responden yang mengaku beragama Kristen dan Protestan. Sedangkan yang beragama Hindu sebanyak 0,2 persen.

Tabel 6.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	97.0
2.	Kristen	2.5
3.	Katolik	0.3
4.	Hindu	0.3
		100

Dari sisi penghasilan, jumlah responden yang mengaku berpenghasilan di bawah 500 ribu dan penghasilan antara 500 ribu hingga 1 juta per bulan jumlahnya hampir berimbang. Terdapat 30 persen yang mengaku memperoleh penghasilan 500 ribu hingga 1 juta, sedangkan yang berpenghasilan di bawah 500 ribu sebanyak 31 persen. Sedangkan yang berpenghasilan antara 1 juta hingga 1,5 juta per bulan sebanyak 22 persen, sebanyak 7 persen mengaku berpenghasilan 1,5 juta hingga 2 juta dan sebanyak 7 persen mengaku berpenghasilan di atas 2 juta. Sisanya sebanyak 3 persen mengaku tidak berpenghasilan.

Tabel 6.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilannya

No.	Penghasilan Tiap Bulan (Rp)	Persentase
1.	Belum berpenghasilan	3.0
2.	<Rp.500.000	30.0
3.	Rp.500.000-Rp.1.000.000	31.0
4.	Rp.1.000.000-Rp.1.500.000	22.0
5	Rp.1.500.000-Rp.2.000.000	7.0
6	>Rp.2.000.000	7.0
		100

Selanjutnya, karakteristik responden jika dilihat dari lokasi tempat tinggal diketahui bahwa sebagian besar bertempat tinggal di kawasan pedesaan. Sebanyak

64,8 persen mengaku tinggal di kawasan pedesaan, sedangkan sisanya sebanyak 35,3 persen mengaku tinggal di kota.

Tabel 6.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

No.	Penghasilan Tiap Bulan (Rp)	Persentase
1.	Pedesaan	64.8
2.	Perkotaan	35.3
		100

Sedangkan dari aspek organisasi keagamaan, sebagian besar responden mengaku aktif dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama, yakni sebanyak 60 persen. Sedangkan urutan terbanyak kedua mengaku tidak aktif dalam organisasi keagamaan sebesar 32,8 persen. Kemudian sisanya sebanyak 5,3 persen mengaku aktif dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah, dan sebanyak 2 persen mengaku aktif dalam organisasi gereja. Lihat tabel 6.8 berikut.

Tabel 6.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Kemasyarakatan

No.	Penghasilan Tiap Bulan (Rp)	Persentase
1.	Tidak aktif	32.8
2.	Muhammadiyah	5.3
3.	Organisasi gereja	2.0
4.	NU	60.0

		100.0
--	--	-------

Dari aspek pilihan partai politik pada pemilu 2004, berdasarkan tabel 7.9 diketahui bahwa sebagian besar responden mengaku memilih PKB pada pemilu 2004 yakni sebesar 27 persen. Sedangkan yang mengaku memilih PDI-P sebanyak 24,3 persen, memilih PD sebanyak 12,5 persen, memilih Golkar 12,5 persen, memilih PAN 5 persen, memilih PPP sebanyak 4,3 persen, memilih PKS sebanyak 3 persen, memilih PDS sebanyak 0,8 persen, memilih PBB sebanyak 0,5. Sedangkan sisanya sebanyak 10,3 persen golput atau tidak memilih pada pemilu 2004. lihat tabel 6.9.

Tabel 6.9

Karakteristik Responden Berdasarkan Organisasi Kemasyarakatan

No.	Penghasilan Tiap Bulan (Rp)	Persentase
1.	Tidak memilih/golput	10.3
2.	PKB	27.0
3.	PDI-P	24.3
4.	PD	12.5
5	PAN	5.0
6	PDS	.8
7	PKS	3.0
8	PPP	4.3
9	PBB	.5
10	PG	12.5
	Total	100.0

VII.2. Hubungan antara variabel karakteristik sosial, ekonomi dan politik responden terhadap pilihan pemilih untuk memilih/tidak memilih calon yang memberi uang

Sebelum menjelaskan hubungan antar variabel terhadap pilihan pemilih untuk memilih/tidak memilih calon yang memberikan uang, perlu dijelaskan terlebih dahulu sikap pemilih terhadap pemberian uang dalam pilkada. Pilihan pemilih di Jawa Timur terhadap pemberian uang selama pilkada dapat dilihat pada tabel 7.10. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar pemilih di Jawa Timur menerima apabila diberi uang oleh kandidat atau tim sukses dalam pilkada. Sebanyak 62,8 persen menyatakan menerima apabila diberi uang, sedangkan sisanya sebanyak 37,3 persen menolak.

Tabel 7.10
Sikap Ketika Diberi Uang Oleh Kandidat/Tim Sukses Tinggal

No.	Penghasilan Tiap Bulan (Rp)	Persentase
1.	Menerima	62.8
2.	Menolak	37.3
		100

Akan tetapi, sikap menerima terhadap pemberian uang oleh kandidat atau tim sukses tersebut belum tentu efektif untuk mendorong masyarakat memilih kandidat yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7.11 yang menggambarkan bahwa tidak semua yang menerima uang memilih kandidat yang memberi uang. Dari tabel

tersebut diketahui bahwa responden yang memilih kandidat pemberi uang hanya sebesar 20,5 persen, sedangkan yang tidak memilih kandidat pemberi uang mencapai angka 79,5 persen.

Tabel 6.11
Pilihan Gubernur

No.	Penghasilan Tiap Bulan (Rp)	Persentase
1.	Memilih yang memberi uang	20.5
2.	Tidak memilih yang memberi uang	79.5
		100.0

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pilihan pemilih terhadap kandidat yang memberi uang relatif tinggi. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik terhadap pilihan pemilih, berikut ini data akan disajikan dalam bentuk tabulasi silang (*cross tab*).

Dari segi jenis kelamin, responden berjenis kelamin perempuan persentasenya lebih besar untuk memilih kandidat yang memberi uang dibandingkan pemilih laki-laki. Prosentase responden perempuan yang memilih kandidat pemberi uang sebesar 28 persen, sementara itu responden laki-laki hanya sekitar 7,4 persen (lihat tabel 6.12). Data ini dapat dijelaskan sesuai dengan uraian pada bab-bab sebelumnya, bahwa perempuan lebih memilih calon pemberi uang dikarenakan melihat keuntungan ekonomis yang diperoleh ketika memilih. Perempuan sebagai pengelola keuangan

keluarga, memandang bahwa memilih kandidat pemberi uang adalah tindakan yang paling rasional, karena langsung menerima *benefit* dari tindakannya pada saat memberikan pilihan. Uang tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk menambah keuangan keluarga, baik untuk urusan belanja maupun kebutuhan yang lain. Hal ini dinilai lebih menguntungkan daripada bentuk janji-janji atau program kerja kandidat, yang di masa akan datang belum tentu terwujud.

Tabel 6.12
Tabulasi Silang Jenis Kelamin dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Jenis kelamin	Wanita	Count	71	181	252
		% within Jenis kelamin	28.2%	71.8%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	86.6%	56.9%	63.0%
	Pria	% of Total	17.8%	45.3%	63.0%
		Count	11	137	148
		% within Jenis kelamin	7.4%	92.6%	100.0%
Total		% within Pilihan Cagub	13.4%	43.1%	37.0%
		% of Total	2.8%	34.3%	37.0%
		Count	82	318	400
		% within Jenis kelamin	20.5%	79.5%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi umur, responden dengan usia 40-49 tahun prosentasenya lebih besar untuk memilih kandidat yang memberi uang dibandingkan tingkatan usia responden yang lain. Responden dengan tingkat pendidikan tersebut memilih kandidat yang memberi uang angkanya sebesar 36,9 persen. Sedangkan prosentase terbesar kedua untuk memilih kandidat yang memberi uang adalah responden dengan usia di atas 50 tahun yakni sebesar 17,9 persen. Selanjutnya diikuti oleh responden berusia dibawah 20 tahun sebesar 16,7 persen; responden berusia 30-39 tahun sebesar 12,7 persen; dan responden berusia 20-29 tahun sebesar 7,2 persen (lihat tabel 6.13).

Data ini menjelaskan kepada kita bahwa responden dengan usia tua cenderung lebih memilih kandidat yang memberi uang dibandingkan responden dengan tingkat usia yang muda. Hal ini dikarenakan, responden dengan tingkatan usia tersebut relative tidak lagi memperhitungkan siapa calon yang akan menang dalam pilkada. Usia yang sudah tua menjadi kendala untuk ikut terlibat dan mengakses langsung aktifitas politik. Disamping itu, faktor kebiasaan dan kelaziman pemberian uang dalam pemilu-pemilu di masa lalu juga diduga memberikan dampak terhadap sikap tersebut. Sehingga keputusan untuk memilih kandidat yang memberi uang, merupakan alternative terbaik dari serangkaian preferensi yang ada.

Tabel 6.13
Tabulasi Silang Usia dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Umur	<20 tahun	Count	2	10	12
		% within Umur	16.7%	83.3%	100.0%

	% within Pilihan Cagub	2.4%	3.1%	3.0%
	% of Total	.5%	2.5%	3.0%
20-29 tahun	Count	5	64	69
	% within Umur	7.2%	92.8%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	6.1%	20.1%	17.3%
	% of Total	1.3%	16.0%	17.3%
30-39 tahun	Count	13	89	102
	% within Umur	12.7%	87.3%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	15.9%	28.0%	25.5%
	% of Total	3.3%	22.3%	25.5%
40-49 tahun	Count	45	77	122
	% within Umur	36.9%	63.1%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	54.9%	24.2%	30.5%
	% of Total	11.3%	19.3%	30.5%
>50 tahun	Count	17	78	95
	% within Umur	17.9%	82.1%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	20.7%	24.5%	23.8%
	% of Total	4.3%	19.5%	23.8%
Total	Count	82	318	400
	% within Umur	20.5%	79.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi tingkat pendidikan, responden yang mengaku tidak pernah mengenyam bangku sekolah prosentase memilih kandidat yang memberi uang jauh lebih besar dibandingkan responden yang bersekolah. Mereka yang tidak bersekolah memilih kandidat pemberi uang sebesar 88,9 persen. Sedangkan responden dengan tingkat SD/Sederajat pilihan terhadap kandidat pemberi uang sebesar 8,6 persen; responden berpendidikan SLTP/Sederajat sebesar 13,3 persen; responden berpendidikan

SLTA/Sederajat sebesar 23,5 persen dan untuk responden berpendidikan Perguruan Tinggi hanya sebanyak 12 persen (lihat tabel 6.14)

Data tersebut menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan memiliki hubungan terhadap sikap memilih kandidat yang memberi uang. Responden yang tidak pernah bersekolah jauh lebih melihat pemberian uang sebagai keuntungan yang paling besar yang didapat dalam setiap agenda pemilu. Dikarenakan keterbatasan pemahaman terhadap permasalahan politik, serta pengalaman tidak pernah mendapat *benefit* langsung dalam pemilu diduga menjadi pendorong utama responden yang tidak bersekolah memilih kandidat pemberi uang.

Tabel 6.14
Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Pendidikan Terakhir	Tidak sekolah	Count	32	4	36
		% within Pendidikan Terakhir	88.9%	11.1%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	39.0%	1.3%	9.0%
		% of Total	8.0%	1.0%	9.0%
SD/Sederajat	SD/Sederajat	Count	20	65	85
		% within Pendidikan Terakhir	23.5%	76.5%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	24.4%	20.4%	21.3%
		% of Total	5.0%	16.3%	21.3%
SLTP/Sederajat	SLTP/Sederajat	Count	12	78	90

	% within Pendidikan Terakhir	13.3%	86.7%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	14.6%	24.5%	22.5%
	% of Total	3.0%	19.5%	22.5%
SLTA/Sederajat	Count	12	127	139
	% within Pendidikan Terakhir	8.6%	91.4%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	14.6%	39.9%	34.8%
	% of Total	3.0%	31.8%	34.8%
PT dan Sederajat	Count	6	44	50
	% within Pendidikan Terakhir	12.0%	88.0%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	7.3%	13.8%	12.5%
	% of Total	1.5%	11.0%	12.5%
Total	Count	82	318	400
	% within Pendidikan Terakhir	20.5%	79.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi pekerjaan, responden dengan pekerjaan sebagai petani persentasenya lebih besar untuk memilih kandidat yang memberi uang jika dibandingkan dengan responden dengan jenis pekerjaan yang lain. Berdasarkan tabel 6.15 diketahui bahwa sebanyak 41,8 persen dari petani memilih kandidat yang memberi uang. Prosentase terbesar kedua adalah responden yang mengaku tidak bekerja yakni sebesar 23,1 persen. Selanjutnya berturut-turut, responden karyawan swasta sebesar 15,7 persen; responden PNS 10 persen, responden sektor informal 9,5 persen; responden pedagang 9,5 persen; responden pengusaha 7,7 persen.

Tingginya prosentase petani yang memilih kandidat pemberi uang kemudian diikuti dengan responden yang tidak bekerja, memberikan gambaran sederhana bahwa pada

tingkat pekerjaan yang memberikan sedikit penghasilan kecenderungan untuk memilih kandidat pemberi uang semakin besar. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa nasib petani di Indonesia relatif tidak terlalu baik dari segi ekonomi. Terlebih sebagian besar petani di Indonesia masuk dalam kategori petani *gurem* atau hanya bekerja sebagai buruh tani. Dengan karakter demikian, memilih kandidat yang memberi uang dianggap sebagai pilihan terbaik sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan hidup. Di sisi yang lain, pengalaman menyaksikan dan terlibat langsung dalam pemilihan kepala desa diduga juga menjadi salah satu pendorong mengapa petani lebih memilih kandidat yang memberi uang. Berdasarkan pengalaman, pemilihan kepala desa di Indonesia pemanfaatan uang untuk meyakinkan pemilih sangat lazim digunakan.

Tabel 6.15
Tabulasi Silang Pekerjaan dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Pekerjaan	Tidak bekerja	Count	3	10	13
		% within Pekerjaan	23.1%	76.9%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	3.7%	3.1%	3.3%
		% of Total	.8%	2.5%	3.3%
PNS		Count	3	27	30
		% within Pekerjaan	10.0%	90.0%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	3.7%	8.5%	7.5%

Pengusaha	% of Total	.8%	6.8%	7.5%
	Count	2	24	26
	% within Pekerjaan	7.7%	92.3%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	2.4%	7.5%	6.5%
sektor informal	% of Total	.5%	6.0%	6.5%
	Count	9	86	95
	% within Pekerjaan	9.5%	90.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	11.0%	27.0%	23.8%
karyawan	% of Total	2.3%	21.5%	23.8%
	Count	8	43	51
	% within Pekerjaan	15.7%	84.3%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	9.8%	13.5%	12.8%
Petani	% of Total	2.0%	10.8%	12.8%
	Count	51	71	122
	% within Pekerjaan	41.8%	58.2%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	62.2%	22.3%	30.5%
pedagang	% of Total	12.8%	17.8%	30.5%
	Count	6	57	63
	% within Pekerjaan	9.5%	90.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	7.3%	17.9%	15.8%
Total	% of Total	1.5%	14.3%	15.8%
	Count	82	318	400
	% within Pekerjaan	20.5%	79.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi penghasilan, responden yang mengaku tidak memiliki penghasilan berada pada prosentase tertinggi yang memilih calon pemberi uang. Sebesar 41,7 persen menyatakan memilih kandidat pemberi uang. Urutan kedua ditempati oleh responden dengan penghasilan di bawah 500 ribu, yakni sebesar 37,5 persen. Selanjutnya berturut-turut, responden dengan penghasilan antara 500 ribu hingga 1 juta sebanyak

16,9 persen; responden berpenghasilan 1 juta hingga 1,5 juta sebesar 10,2 persen; responden berpenghasilan 1,5 hingga 2 juta sebesar 0 persen dan terakhir responden berpenghasilan di atas 2 juta sebanyak 7,1 persen (lihat tabel 6.16)

Tabel 6.16
Tabulasi Silang Tingkat Penghasilan dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Penghasilan tidak berpenghasilan	Count		5	7	12
	% within Penghasilan		41.7%	58.3%	100.0%
	% within Pilihan Cagub		6.1%	2.2%	3.0%
	% of Total		1.3%	1.8%	3.0%
<Rp.500.000	Count		45	75	120
	% within Penghasilan		37.5%	62.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub		54.9%	23.6%	30.0%
	% of Total		11.3%	18.8%	30.0%
Rp.500.000- <Rp.1.000.000	Count		21	103	124
	% within Penghasilan		16.9%	83.1%	100.0%
	% within Pilihan Cagub		25.6%	32.4%	31.0%
	% of Total		5.3%	25.8%	31.0%
Rp.1.000.000- <Rp.1.500.000	Count		9	79	88
	% within Penghasilan		10.2%	89.8%	100.0%
	% within Pilihan Cagub		11.0%	24.8%	22.0%
	% of Total		2.3%	19.8%	22.0%
Rp.1.500.000-	Count		0	28	28

Total	<Rp.2.000.000	% within Penghasilan	.0%	100.0%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	.0%	8.8%	7.0%
		% of Total	.0%	7.0%	7.0%
	>Rp.2.000.000	Count	2	26	28
		% within Penghasilan	7.1%	92.9%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	2.4%	8.2%	7.0%
	Total	% of Total	.5%	6.5%	7.0%
		Count	82	318	400
		% within Penghasilan	20.5%	79.5%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi agama, berdasarkan tabel 6.17 diketahui bahwa sebanyak 21,1 persen responden yang beragama Islam memilih kandidat pemberi uang dalam pilkada. Sedangkan responden beragamaan Kristen, 10 persen diantaranya memilih kandidat pemberi uang. Sedangkan untuk responden yang beragama Katolik dan Hindu, tidak ada responden yang memilih kandidat pemberi uang dalam pilkada.

Tabel 6.17
Tabulasi Silang Agama dan Pilihan Pemilih

Agama	Hindu	Count	Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
			0	1	1

	% within Agama	.0%	100.0%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	.0%	.3%	.3%
	% of Total	.0%	.3%	.3%
Kristen	Count	1	9	10
	% within Agama	10.0%	90.0%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	1.2%	2.8%	2.5%
	% of Total	.3%	2.3%	2.5%
Katolik	Count	0	1	1
	% within Agama	.0%	100.0%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	.0%	.3%	.3%
	% of Total	.0%	.3%	.3%
Islam	Count	81	307	388
	% within Agama	20.9%	79.1%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	98.8%	96.5%	97.0%
	% of Total	20.3%	76.8%	97.0%
Total	Count	82	318	400
	% within Agama	20.5%	79.5%	100.0%
	% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi organisasi keagamaan, dari tabel 6.18 diketahui bahwa terdapat 24,6 persen responden NU yang mengaku memilih calon pemberi uang. Sedangkan responden Muhammadiyah sebesar 4,6 persen saja yang memilih calon pemberi uang. Dan untuk responden organisasi gereja tidak ada sama sekali yang memilih kandidat pemberi uang. Sedangkan responden yang tidak aktif dalam organisasi keagamaan sebanyak 16,8 persen yang memilih kandidat pemberi uang.

Tabel 6.18
Tabulasi Silang Organisasi keagamaan dan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Organisasi keagamaan	Tidak aktif	Count	22	109	131
		% within Organisasi keagamaan	16.8%	83.2%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	26.8%	34.3%	32.8%
	Muhammadiyah	% of Total	5.5%	27.3%	32.8%
		Count	1	20	21
		% within Organisasi keagamaan	4.8%	95.2%	100.0%
	Organisasi gereja	% within Pilihan Cagub	1.2%	6.3%	5.3%
		% of Total	.3%	5.0%	5.3%
		Count	0	8	8
	NU	% within Organisasi keagamaan	.0%	100.0%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	.0%	2.5%	2.0%
		% of Total	.0%	2.0%	2.0%
Total	Count	59	181	240	
	% within Organisasi keagamaan	24.6%	75.4%	100.0%	
	% within Pilihan Cagub	72.0%	56.9%	60.0%	
	% of Total	14.8%	45.3%	60.0%	
	Count	82	318	400	
	% within Organisasi keagamaan	20.5%	79.5%	100.0%	
	% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	20.5%	79.5%	100.0%	

Sedangkan dari segi pilihan partai politik, responden pemilih PKB menduduki urutan pertama terbanyak yang memilih kandidat pemberi uang. Terdapat 38 persen pemilih PKB yang memilih kandidat yang memberikan uang. Sedangkan urutan kedua adalah PPP yang mencapai 29,4 persen dari pemilihnya yang memilih kandidat pemberi uang. Berturut-turut kemudian PDI-P sekitar 20,6 persen; Partai Golkar sebesar 16 persen; PKS sebesar 8,3 persen; Demokrat sebesar 2 persen; selanjutnya PAN, PDS dan PBB tidak ada sama sekali yang memilih. Sedangkan responden yang dulu tidak memilih sebesar 14,6 persen memilih calon pemberi uang. (lihat tabel 6.19)

Tabel 6.19
Tabulasi Silang Pilihan partai pada pemilu 2004 dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	
Pilihan partai pada pemilu 2004	Tidak memilih/golput	Count	6	35	41
		% within Pilihan partai pada pemilu 2004	14.6%	85.4%	100.0%
PKB		Count	41	67	108
		% within Pilihan partai pada pemilu 2004	38.0%	62.0%	100.0%
PDI-P		Count	20	77	97
		% within Pilihan partai pada pemilu 2004	20.6%	79.4%	100.0%

PD	Count	1	49	50
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	2.0%	98.0%	100.0%
PAN	Count	0	20	20
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	.0%	100.0%	100.0%
PDS	Count	0	3	3
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	.0%	100.0%	100.0%
PKS	Count	1	11	12
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	8.3%	91.7%	100.0%
PPP	Count	5	12	17
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	29.4%	70.6%	100.0%
PBB	Count	0	2	2
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	.0%	100.0%	100.0%
PG	Count	8	42	50
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	16.0%	84.0%	100.0%
Total	Count	82	318	400
	% within Pilihan partai pada pemilu 2004	20.5%	79.5%	100.0%

Dari segi lokasi tempat tinggal, diketahui bahwa responden yang tinggal di desa prosentasenya lebih besar memilih kandidat yang memberi uang daripada responden yang tinggal di kota. Berdasarkan tabel 6.20, jumlah prosentase responden yang tinggal di desa yang memilih kandidat pemberi uang sebesar 21,6 persen. Sedangkan responden yang tinggal di kota sebesar 18,4 persen.

Tabel 6.20
Tabulasi Silang Lokasi tempat tinggal dengan Pilihan Pemilih

			Pilihan Cagub		Total
			Memilih calon yang memberi uang	Tidak memilih calon yang memberi uang	Memilih calon yang memberi uang
Lokasi tempat tinggal	Pedesaan	Count	56	203	259
		% within Lokasi tempat tinggal	21.6%	78.4%	100.0%
	Kota	% within Pilihan Cagub	68.3%	63.8%	64.8%
		% of Total	14.0%	50.8%	64.8%
Total	Pedesaan	Count	26	115	141
		% within Lokasi tempat tinggal	18.4%	81.6%	100.0%
	Kota	% within Pilihan Cagub	31.7%	36.2%	35.3%
		% of Total	6.5%	28.8%	35.3%
	Total	Count	82	318	400
		% within Lokasi tempat tinggal	20.5%	79.5%	100.0%
		% within Pilihan Cagub	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	20.5%	79.5%	100.0%

VI.3. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pilihan politik karena uang (*Money Politics*)

Uraian-uraian sebelumnya hanya mendeskripsikan frekuensi dari beberapa variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Tahap selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana pengaruh variabel-variabel independent secara bersama-sama terhadap preferensi pilihan politik karena uang maka digunakan analisis statistic regresi logistic ganda sebagai alat analisis. Setidaknya terdapat dua alasan mendasar mengapa peneliti menggunakan alat analisis regresi logistic sebagai alat analisis. Pertama, karena data yang akan dianalisis sifatnya kategorial, yang didasarkan pada data nominal dan ordinal. Kedua, peneliti bermaksud untuk menggambarkan pengaruh variabel independent terhadap preferensi pilihan politik karena uang.

Sementara itu, untuk pembanding masing-masing indikator adalah sebagai berikut: responden yang tinggal di desa untuk indikator lokasi tempat tinggal; responden yang berusia di atas 50 tahun untuk indikator umur; responden berjenis kelamin laki-laki untuk indikator jenis kelamin; responden tingkat pendidikan perguruan tinggi untuk indikator tingkat pendidikan; responden beragama Islam untuk indikator agama; responden dengan pekerjaan pedagang untuk indikator pekerjaan; responden yang berpenghasilan di atas 2 juta untuk indikator penghasilan; responden yang aktif di NU untuk indikator ormas, responden pemilih Golkar untuk indikator pilihan partai.

Hasil analisis regresi logistik ganda antara variabel jenis kelamin dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.21 berikut.

Tabel 6.21
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Jenis Kelamin dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	2.522	.313	64.770	1	.000	
Perempuan	-1.586	.343	21.357	1	.000	.205
Laki-laki	0(b)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya hubungan antara Jenis Kelamin dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,205 lebih besar dibandingkan responden laki-laki. Atau responden dengan jenis kelamin perempuan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 4,878 kali lebih besar daripada responden laki-laki

Selanjutnya analisis regresi logistik ganda antara variabel umur dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.22 berikut.

Tabel 6.22
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Umur dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	Intercept	1.523	.268	32.397	1	.000	
	<20 thn	.086	.820	.011	1	.916	1.090
	20-29 thn	1.026	.536	3.664	1	.056	2.790
	30-39 thn	.400	.400	1.002	1	.317	1.492
	40-49 thn	-.986	.327	9.105	1	.003	.373
	> 50 thn	0(b)	.	.	.	0	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, hasil hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya hubungan antara Umur dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan bahwa **responden dengan umur antara 40-49 tahun kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,373 lebih besar dibandingkan responden berumur di atas 50 tahun. Atau responden dengan umur antara 40-49 tahun kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 2,680 kali lebih besar daripada responden berumur di atas 50 tahun.**

Analisis regresi logistik ganda antara tingkat pendidikan dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.23 berikut.

Tabel 6.23
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Tingkat Pendidikan
dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	1.992	.435	20.960	1	.000	
Intercept						
Tidak bersekolah	-4.072	.686	35.229	1	.000	.017
SD	-.814	.505	2.599	1	.107	.443
SLTP	-.121	.534	.051	1	.821	.886
SLTA	.367	.530	.480	1	.489	1.443
PT	0(b)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan bahwa **responden tidak bersekolah kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,017 lebih besar dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Atau responden yang tidak bersekolah kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 58,823 kali lebih besar daripada responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.**

Analisis regresi logistik ganda antara pekerjaan dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.24 berikut.

Tabel 6.24
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Pekerjaan
dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	2.251	.429	27.514	1	.000	
Intercept						
Tidak bekerja	-1.047	.786	1.776	1	.183	.351
PNS	-.054	.745	.005	1	.942	.947
Pengusaha	.234	.852	.075	1	.784	1.263
Sektor Informal	.006	.554	.000	1	.992	1.006
Karyawan	-.570	.577	.976	1	.323	.566
Petani	-1.920	.467	16.925	1	.000	.147
Pedagang	0(b)			0		

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, hasil analisis regresi logistik hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya hubungan antara Pekerjaan dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan bahwa **responden dengan pekerjaan petani kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,147 lebih besar dibandingkan responden dengan pekerjaan pedagang. Atau responden dengan pekerjaan petani kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 6,802 kali lebih besar daripada responden dengan pekerjaan pedagang.**

Analisis regresi logistik ganda antara tingkat penghasilan dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.25 berikut.

Tabel 6.25
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Penghasilan
dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	2.565	.734	12.218	1	.000	
Intercept						
Tidak Berpenghasilan <500 ribu	-2.228	.939	5.635	1	.018	.108
500 rb-1 juta	-2.054	.758	7.351	1	.007	.128
1-1,5 juta	-.975	.772	1.595	1	.207	.377
1,5-2 juta	-.393	.814	.233	1	.629	.675
> 2 juta	20.161	.000	.	1	.	56978 7121.4 83
	0(b)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, hasil hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya hubungan antara Tingkat Penghasilan dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, responden tidak berpenghasilan kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,108 lebih besar dibandingkan responden dengan penghasilan di atas 2 Juta per bulan. Atau responden tidak berpenghasilan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 9,259 kali lebih besar daripada responden dengan penghasilan di atas 2 juta

Kedua, responden berpenghasilan di bawah 500 ribu per bulan kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,128 lebih besar dibandingkan responden dengan penghasilan di atas 2 Juta per bulan. Atau

responden berpenghasilan di bawah 500 ribu perbulan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 7,812 kali lebih besar daripada responden dengan penghasilan di atas 2 juta.

Analisis regresi logistik ganda antara agama dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.26 berikut.

Tabel 6.26
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Agama
dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	Intercept	1.332	.125	113.778	1	.000	
	Hindu	17.393	.000	.	1	.	3579519 1.656
	Kristen	.865	1.061	.664	1	.415	2.375
	Katolik	17.393	.000	.	1	.	3579519 1.656
	Islam	0(b)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dan hasil setiap variabel $P > 0,05$ maka dapat disimpulkan hasil analisis regresi logistik antara agama dengan pilihan terhadap kandidat pemberi uang tidak memiliki pengaruh atau hubungan.

Analisis regresi logistik ganda antara Ormas dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.27 berikut.

Tabel 6.27
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Ormas
dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	Intercept	1.121	.150	55.911	1	.000	
	Tidak Aktif	.479	.278	2.980	1	.084	1.615
	Muhammadiyah	1.875	1.036	3.277	1	.070	6.519
	Organisasi Gereja	19.605	.000	.	1	.	32676 8702.4 70
	NU	0(b)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dan hasil setiap variabel $P > 0,05$ maka dapat disimpulkan hasil analisis regresi logistik antara organisasi kemasyarakatan dengan pilihan terhadap kandidat pemberi uang tidak memiliki pengaruh atau hubungan.

Analisis regresi logistik ganda antara Partai Politik dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.28 berikut.

Tabel 6.28
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Parpol
dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	Intercept	1.658	.386	18.478	1	.000	
	Tdk Memilih	.105	.587	.032	1	.857	1.111

PKB	-1.167	.434	7.241	1	.007	.311
PDI-P	-.310	.460	.454	1	.500	.733
PD	2.234	1.081	4.267	1	.039	9.333
PAN	18.067	4294.0	.000	1	.997	702446
		91				46.350
PDS	18.067	.000	.	1	.	702446
						46.350
PKS	.740	1.113	.441	1	.506	2.095
PPP	-.783	.657	1.418	1	.234	.457
PBB	18.067	.000	.	1	.	702446
						46.350
Golkar	0(c)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, hasil analisis regresi logistik menunjukkan adanya hubungan antara Pilihan Parpol dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, responden pemilih PKB kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,311 lebih besar dibandingkan responden dengan responden pemilih Golkar. Atau responden pemilih PKB kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 3,215 kali lebih besar daripada responden dengan pemilih Golkar.

Kedua, responden pemilih Demokrat kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 9,333 lebih besar dibandingkan responden dengan responden pemilih Golkar. Atau responden pemilih Demokrat kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 0,107 lebih besar daripada responden dengan pemilih Golkar.

Analisis regresi logistik ganda antara Partai Politik dengan pilihan pemilih terhadap calon pemberi uang dapat dilihat pada tabel 6.29 berikut.

Tabel 6.29
Analisis Regresi Logistik Ganda Variabel Lokasi Tempat Tinggal dengan Pilihan Pemilih

Pilihan Cagub(a)	B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Tidak memilih calon yang memberi uang	1.487	.217	46.879	1	.000	
Desa	-.199	.264	.566	1	.452	.820
Kota	0(b)	.	.	0	.	.

a The reference category is: Memilih calon yang memberi uang.

b This parameter is set to zero because it is redundant.

Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ dan hasil setiap variabel $P > 0,05$ maka dapat disimpulkan hasil analisis regresi logistik antara lokasi tempat tinggal responden dengan pilihan terhadap kandidat pemberi uang tidak memiliki pengaruh atau hubungan.

VI.4. Analisis Teoritik

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa prosentase pemilih yang pilihannya dipengaruhi oleh uang ternyata cukup tinggi di Jawa Timur. Terdapat sekitar 20,5 persen pemilih yang mengaku akan memilih kandidat yang memberikan uang. Apabila dibandingkan dengan perolehan suara akhir Pilgub Jawa Timur, dimana dua calon yang lolos putaran kedua hanya

memperoleh suara pada kisaran 20 persen hingga 30 persen, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan uang akan sangat efektif untuk menunjang kemenangan kandidat.

Sedangkan dari hasil analisis regresi logistic diketahui dari sembilan variabel independent yang dianalisis, terdapat enam variabel yang berpengaruh terhadap pilihan *voters* untuk memilih kandidat yang memberi uang. Variabel-variabel tersebut antara lain: jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan pilihan partai politik pada pemilu 2004. Sedangkan tiga variabel lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap pilihan *voters* untuk memilih kandidat yang memberi uang, yakni variabel agama, aktifitas organisasi keagamaan dan lokasi tempat tinggal.

Pengaruh kuatnya variabel jenis kelamin terhadap pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang ditunjukkan dengan angka estimasi sebesar 4,878 kali kemungkinan perempuan memilih kandidat yang memberi uang daripada laki-laki. Data ini konsisten dengan hipotesis awal penelitian, bahwa pemilih perempuan relatif lebih memilih kandidat pemberi uang karena dianggap memberikan keuntungan ekonomis yang lebih besar jika dibandingkan dengan pemilih yang tidak memberikan uang. Disamping itu pilihan yang diambil juga tidak memberikan resiko apapun terhadap pemilih perempuan. Pertimbangan-pertimbangan lainnya berupa kiprah kandidat di masa lalu (*retrospective voting*) atau program-program kerja yang dijanjikan di masa yang akan datang (*prospective voting*) sebagaimana kajian Fiorina (1981) tidak telalu diperhitungkan oleh pemilih perempuan. Pemilih perempuan ini lebih mendekati model kedua pendekatan pilihan rasional yang digunakan oleh Richard Lau dan David Redlawsk (2006), bahwa pemilih perempuan lebih

memperhatikan pada pengaruh langsung pilihannya terhadap kondisi kehidupannya sehari-hari. Pemilih dalam kategori ini tidak terlalu memperhatikan berbagai aspek tentang kandidat, seperti program kerja, kualitasnya, dikarenakan akan membutuhkan waktu khusus untuk memahaminya. Terlebih siapapun yang terpilih nanti juga tidak dapat dipastikan membawa keuntungan bagi mereka.

Penjelasan yang hampir sama terhadap pemilih dengan usia yang lebih tua. Data yang ada menunjukkan bahwa responden dengan usia tua cenderung lebih memilih kandidat yang memberi uang dibandingkan responden dengan tingkat usia yang muda. Hal ini dikarenakan, responden dengan tingkatan usia tersebut relative tidak lagi memperhitungkan siapa calon yang akan menang dalam pilkada. Usia yang sudah tua menjadi kendala untuk ikut terlibat dan mengakses langsung aktifitas politik. Sehingga jika dihadapkan antara calon yang memberi uang dengan yang tidak memberikan uang, pemilih usia tua akan lebih condong kepada pemberi uang karena lebih menguntungkan dan tidak beresiko apapun. Disamping itu, faktor kebiasaan dan kelaziman pemberian uang dalam pemilu-pemilu di masa lalu juga diduga memberikan dampak terhadap sikap tersebut. Sehingga keputusan untuk memilih kandidat yang memberi uang, merupakan alternative terbaik dari serangkaian preferensi yang ada.

Sedangkan data yang menjelaskan mengenai hubungan tingkat pendidikan dengan pilihan untuk memilih calon yang memberi uang Data tersebut menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan memiliki hubungan terhadap sikap memilih kandidat yang memberi uang. Responden yang tidak pernah bersekolah jauh lebih melihat pemberian uang sebagai keuntungan yang paling besar yang didapat

dalam setiap agenda pemilu. Kemungkinan responden yang tidak bersekolah memilih kandidate yang memberi uang sebesar **58,823 kali** daripada responden dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Dikarenakan keterbatasan pemahaman terhadap permasalahan politik, serta pengalaman tidak pernah mendapat *benefit* langsung dalam pemilu diduga menjadi pendorong utama responden yang tidak bersekolah memilih kandidate pemberi uang. Di sisi yang lain, bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan memadai atau bahkan tinggi, kecenderungan untuk mempertimbangkan aspek yang lain dalam memilih juga semakin besar. Sehingga biasanya mereka akan memiliki pemahaman yang cukup terhadap kandidate serta proses politik yang berlangsung. Hal inilah yang menjadi penjelasan mengapa pemilih dengan tingkat pendidikan yang memadai tidak terpengaruh dengan pemberian uang dalam pilkada.

Selanjutnya data yang menjelaskan hubungan antara pekerjaan dengan pilihan terhadap kandidate yang memberi uang, menunjukkan bahwa responden yang bekerja sebagai petani kemungkinan memilih kandidate yang memberi uang sebesar **6,802 kali** dibandingkan dengan responden yang bekerja sebagai pedagang. Data ini dapat dijelaskan dari aspek keterbatasan perekonomian masyarakat petani jika dibandingkan dengan pedagang. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagian masyarakat petani di Indonesia bukanlah petani yang kaya raya, dalam arti kebanyakan hanya merupakan petani *gurem* dengan lahan kurang dari satu hektar. Bahkan banyak diantaranya yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Dengan kondisi yang demikian menjadi wajar jika petani lebih cenderung memilih kandidate yang memberikan uang daripada responden pedagang. Pemberian uang dalam konteks pilkada menjadi berkah tersendiri bagi kelompok masyarakat bawah seperti petani. Jika dalam satu

hari menjadi buruh tani hanya digaji tidak lebih dari 20 ribu, maka dengan hanya memberikan suara untuk kandidat mereka bisa memperoleh lebih banyak. Berbeda dengan pedagang, baik dalam skala kecil maupun besar, relatif mempertimbangkan aspek untung rugi yang lebih luas tidak hanya dalam bentuk pemberian uang.

Sedangkan data yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel penghasilan dengan pilihan terhadap kandidat yang memberi uang, dimana responden yang tidak berpenghasilan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah **9,259 kali** lebih besar daripada responden dengan penghasilan di atas 2 juta. Sedangkan responden berpenghasilan di bawah 500 ribu perbulan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah **7,812 kali** lebih besar daripada responden dengan responden penghasilan di atas 2 juta. Data tersebut sesuai dengan hipotesis awal penelitian, bahwa responden dengan penghasilan rendah cenderung memilih kandidat pemberi uang.

Selanjutnya data tentang hubungan pilihan parpol terhadap pilihan terhadap kandidat yang memberi uang, menunjukkan bahwa responden pemilih PKB kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah **3,215 kali** lebih besar daripada responden pemilih Golkar. Dan responden pemilih Demokrat kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah **9,333 lebih besar** dibandingkan responden dengan responden pemilih Golkar. Data tentang pemilih PKB yang lebih besar kemungkinannya memilih kandidat pemberi uang, dapat dijelaskan dari kondisi basis massa PKB yang sebagian besar terdiri dari masyarakat bawah, yang dicirikan dengan kelompok masyarakat petani, nelayan dan sebagainya. Disamping itu, meski selama ini kecenderungan pilihannya dalam pemilu lebih

banyak mengikuti Kiai, dikarenakan kuatnya tradisi santri, namun dari data tersebut diketahui bahwa pemilih PKB rentan untuk berpindah pilihan dengan faktor uang. Dugaan peneliti terhadap kecenderungan preferensi pemilih PKB terhadap calon pemberi uang ini, dikarenakan banyaknya Kiai yang terlibat langsung dalam pertarungan politik. Termasuk ikut terlibat dalam pembagian *sodaqoh* politik kepada masyarakat. Hal ini kemungkinan berdampak terhadap dua hal, pertama, terlibatnya Kiai dalam aksi dukung mendukung calon semakin mengurangi tingkat kepercayaan umat untuk mengikuti pilihan/fatwa Kiai. Kedua, oleh karena Kiai-nya sendiri ikut membagikan *sodaqoh* politik, maka pemberian uang dimaknai sebagai kewajiban untuk mencoblos kandidat yang memberikan *sodaqoh*. Perlu ada penelitian yang lebih lanjut untuk menguji hipotesis ini.

Sedangkan pemilih Demokrat cenderung tidak memilih calon yang memberi uang, menurut dugaan peneliti dikarenakan kuatnya pertimbangan kualitas calon dan ketokohan. Dugaan ini diperkuat dengan hasil pemilu tahun 2004, dimana kenaikan suara pemilih Demokrat secara drastis lebih banyak dikarenakan kuatnya figur Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilih Demokrat yang rata-rata pelarian dari pemilih PDI-P dan Golkar pada saat pemilu 2004, memilih Demokrat karena melihat figur SBY. Ciri dan perilaku memilih konstituen Demokrat ini dapat menjadi penjelasan mengapa mereka cenderung tidak memilih kandidat yang memberikan uang.

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Penelitian dengan tema “Pengaruh Uang Terhadap Probabilitas Pilihan Politik Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008” yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, menyimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Terdapat hubungan antara Jenis Kelamin dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dengan parameter estimasi: responden dengan jenis kelamin perempuan kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,205 lebih besar dibandingkan responden laki-laki. Atau responden dengan jenis kelamin perempuan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 4,878 kali lebih besar daripada responden laki-laki
2. Terdapat hubungan antara Umur dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dengan parameter estimasi: responden dengan umur antara 40-49 tahun kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,373 lebih besar dibandingkan responden berumur di atas 50 tahun. Atau responden dengan umur antara 40-49 tahun kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 2,680 kali lebih besar daripada responden berumur di atas 50 tahun.
3. Terdapat hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dengan parameter estimasi: responden tidak bersekolah kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang

adalah 0,017 lebih besar dibandingkan responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Atau responden yang tidak bersekolah kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 58,823 kali lebih besar daripada responden dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi.

4. Terdapat hubungan antara Pekerjaan dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dengan parameter estimasi: responden dengan pekerjaan petani kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,147 lebih besar dibandingkan responden dengan pekerjaan pedagang. Atau responden dengan pekerjaan petani kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 6,802 kali lebih besar daripada responden dengan pekerjaan pedagang.
5. Terdapat hubungan antara Tingkat Penghasilan dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dengan parameter estimasi sebagai berikut:
Pertama, responden tidak berpenghasilan kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,108 lebih besar dibandingkan responden dengan penghasilan di atas 2 Juta per bulan. Atau responden tidak berpenghasilan kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 9,259 kali lebih besar daripada responden dengan penghasilan di atas 2 juta
Kedua, responden berpenghasilan di bawah 500 ribu per bulan kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,128 lebih besar dibandingkan responden dengan penghasilan di atas 2 Juta per bulan. Atau responden berpenghasilan di bawah 500 ribu perbulan kemungkinan untuk

memilih kandidat pemberi uang adalah 7,812 kali lebih besar daripada responden dengan responden penghasilan di atas 2 juta.

adanya hubungan antara Pilihan Parpol dengan Pilihan untuk memilih kandidat yang memberi uang. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

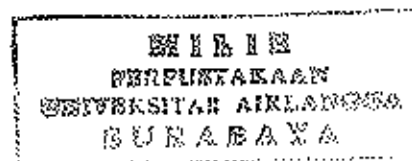
Pertama, responden pemilih PKB kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 0,311 lebih besar dibandingkan responden dengan responden pemilih Golkar. Atau responden pemilih PKB kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 3,215 kali lebih besar daripada responden dengan pekerjaan pedagang.

Kedua, responden pemilih Demokrat kemungkinan untuk tidak memilih kandidat yang memberi uang adalah 9,333 lebih besar dibandingkan responden dengan responden pemilih Golkar. Atau responden pemilih Demokrat kemungkinan untuk memilih kandidat pemberi uang adalah 0,107 lebih besar daripada responden dengan pemilih Golkar.

VII.2 Saran

Penulisan Tesis dengan judul “Pengaruh Uang Terhadap Probabilitas Pilihan Pemilih Dalam Pilkada Jawa Timur 2008” merupakan salah satu perspektif saja dari sekian banyak kajian tentang dinamika politik lokal di Indonesia. Peneliti merasa masih banyak hal yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti. Oleh karenanya ke depan penulis mengharapkan adanya kajian lain yang dapat melengkapi studi-studi terdahulu, sehingga semakin memperkaya khazanah studi *votting behavior* dan politik lokal.

Dalam penulisan ini, peneliti menyadari betul perlunya tambahan beberapa variabel penjelas untuk semakin dapat menjelaskan fenomena pengaruh uang terhadap pilihan politik. Beberapa variabel yang perlu untuk dicari korelasinya dengan preferensi terhadap politik uang, misalnya: frekuensi pemanfaatan sarana informasi, akses media dan beberapa variabel yang lain yang menggambarkan kondisi perekonomian makro.



Daftar Pustaka

- Asfar, Muhamamad. *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*. PuSDcHAM, : Surabaya, 2002
- Al Husin, Syahri. *Aplikasi Statistik Praktis Dengan SPSS 9*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format Kuantitatif/kualitatif*. Surabaya ; Airlangga University Press, 2001
- Flanigan, H William dan Nancy H. Zingales. *Political Behavior of The American Electorate*. CQ Press ; Washington DC, 2002
- Hok Ham, Ong ; *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong, Refleksi Historis Nusantara*. Jakarta ; Penerbit Buku Kompas, 2002
- Ismawan, Indra, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Yogyakarta: Media Presindo, 1999.
- Juni Widjaya, Erwin. *Perilaku Memilih Masyarakat Kota Surabaya*. Skripsi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Ende ; Nusa Indah. 1997
- Leaf, David, L. *Electing America's Governors: The Politics Of Executive Elections*, New York: Palgrave Macmillan, 2006
- Lau, Richard dan David P Redlawsk. *How voters Decide : information processing during election campaign*. Cambridge University Press. New York 2006.
- Marijan, Kacung. *Demokratisasi di Daerah : Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Pustaka Eureka&PusDeHAM : Surabaya 2006.

- Mas'ood, Muchtar dan Andrew, Collin Mc. *Perbandingan sistem politik.*, Yogyakarta ; Gadjah Mada University press, 1987
- Niemi, Richard G. dan Herbert F. Weisberg. *Controversies in Voting Behavior.* Congressional Quarterly Inc. Washington D.C.1984.
- Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian.* Alfabeta ; Bandung, 2003
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik.* Grasindo, Jakarta 1998.
- W. Finifter, Ada. (ed) *Political Science : The State of the discipline II.* American Political Science Association ;Washington. 1993.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta ; Media Pressindo, 2002.

Lampiran

Nama Pewawancara :

**Kuesioner Penelitian Pengaruh Uang Terhadap
Probabilitas Pilihan Pemilih Dalam Pilkada Jatim 2008**

1. *Kabupaten/Kota Tempat Tinggal?* 1.()
 1.Pacitan 2.Ponorogo 3.Trenggalek 4.Tulungagung 5.Blitar
 6.Kediri 7.Malang 8.Lumajang 9.Jember 10.Banyuwangi
 11.Bondowoso 12.Situbondo 13.Probolinggo 14.Pasuruan
 15.Sidoarjo 16.Mojokerto 17.Jombang 18.Nganjuk 19.Madiun
 20.Magetan 21.Ngawi 22.Bojonegoro 23.Tuban 24.Lamongan
 25.Gresik 26.Bangkalan 27.Sampang 28.Pamekasan 29.Sumenep
 30.Kota Kediri 31.Kota Blitar 32.Kota Malang 33.Kota Probolinggo
 34.Kota Pasuruan 35.Kota Mojokerto 36.Kota Madiun 37.Kota Surabaya
 38.Kota Batu
2. *Berapa Umur Bpk/Ibu/Sdr?* 2.()
 1. < 20 tahun 2. 20-29 tahun 3. 30-39 tahun
 4. 40-49 tahun 5. > 50 tahun
3. *Jenis kelamin responden?* 3.()
 1. Pria 2. Wanita
4. *Pendidikan terakhir Sdr?* 4.()
 1. Tidak sekolah 2. SD/ sederajat 3. SLTP/ sederajat
 4. SLTA/ sederajat 5. P T dan sederajat
5. *Apakah Agama Sdr anut?* 5.()
 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Budha 5. Hindu
6. *Apakah pekerjaan Sdr ?* 6.()
 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pengusaha 4. Pedagang 5. Karyawan
 6. Petani 7. Sektor informal 8. dll ..
7. *Penghasilan Sdr per bulan ?* 7.()
 1.< Rp. 500.000 2.Rp. 500.000 -< Rp. 1.000.000 3.Rp. 1.000.000 -< Rp. 1.500.000
 4.Rp. 1.500.000 -< Rp. 2.000.000 5.> Rp. 2.000.000
8. *Aktif di organisasi keagamaan?* 8.()
 1.NU 2. Muhammadiyah 3.Organisasi Islam lainnya
 4. Organisasi Gereja 5. dll
9. *Pemilu 2004, saudara memilih partai apa ?* 9.()
 1. PDI-P 2. PKB 3. PD 4. PAN 5. PDS 6. PKS
 7. PPP 8. PBB 9. PG 10. dll ...
10. *Dimana lokasi tempat tinggal Bpk/Ibu/Sdr ?* 10.()
 1. Desa 2 Kota
11. *Bagaimana sikap Bpk/Ibu/Sdr jika diberi uang oleh kandidat/tim sukses kandidat* 11.()
 1. Menerima 2. Menolak

12. Bagaimana sikap Bpk/Ibu/Sdr terhadap calon yang memberi uang? 12.()
1. Memilih calon pemberi uang 2. Tidak memilih calon yang memberi uang

Identitas Responden

Kecamatan :
Nama :
Alamat :
Catatan :
.....